

Tabloid



# Info Aceh

Menuju Masyarakat Informasi

**Aceh Seujahtera**  
melalui Percepatan  
pembangunan AKI dan AKB  
melalui Stuntir  
Capaian Pembangunan  
Aceh Tahun 2017



Pemerintah Aceh telah melakukan perbaikan pola pelaksanaan Musrenbang. Kami yakin, Aceh Hebat tidak akan terwujud jika tidak diawali pola perbaikan sejak perencanaan."

drh. Irwandi Yusuf, M.Sc  
Gubernur Aceh

**Musrenbang RKPA-2019**  
**Menuju Aceh**  
**Hebat**



# Jendela Redaksi

**ALHAMDULILLAH** dengan izin Allah, akhirnya kami kru redaksi dan jajaran supporting, berhasil merampungkan edisi perdana tabloid yang kami beri titel INFO ACEH. Kami merampungkannya di sela sela menggelindingnya hari hari akhir April 2018. Karena ini edisi perdana, tentu saja terasa spesial bagi kami, sebagai buah karya yang tentu saja butuh saran dan masukan di sana sini.

Karena edisi perdana, tentu butuh butuh spirit serta daya kreasi ekstra hingga ke divisi layouter. Sebagai ‘pemasak’ atau koki, kami ingin agar menu yang kami sajikan mendapat tempat di altar hati pembaca.

Melalui tabloid ini ingin agar setiap geliat kebijakan Pemerintah Aceh sebagai founder juga tersosialisasikan secara utuh, transparan dan tanpa basa basi. Karena kami juga sadar tentang komitmen tiada tepi dari Pemerintah Aceh tentang transparansi, sebagai bagian dari terwujudnya clean government dan good governance.

Edisi perdana kali ini kami menurunkan sebuah langkah penepatan janji Pemerintah Irwandi-Nova (Gub-Wagub Aceh) tentang layanan terintegrasi. Tepatnya dalam hal layanan kesehatan di RSUDZA Banda Aceh yang melibatkan Diskominsa, Diskes dan DRKA. Hasilnya, masyarakat Aceh nantinya hanya bermodal KTP akan mendapat layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Aceh. Dulu hal itu terasa bagai sebuah mimpi yang tak kan pernah terwujud.

Kami juga menurunkan laporan seputar keberhasilan Tim Bidding PON Aceh yang berhasil meyakinkan KONI Pusat, hingga Aceh dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-22 tahun 2024 nanti. Sukses ini diraih setelah dua tahun silam, Aceh gagal meraih status tuan rumah PON ke-21 tahun 2020 yang akhirnya jatuh ke tangan Propinsi Papua. Sebuah sejarah telah dicetak, Aceh bersama Sumut menjadi tuan rumah PON. Sukses yang jutga bagian dari cita cita Irwandi-Nova tentang Aceh Teuga, tepatnya meraih prestasi maksimal di bidang olahraga.

Secara detil, melalui edisi perdana Info Aceh ini kami juga menurunkan seputar rencana pembangunan Aceh tahun 2019, yang lahir melalui kesepakatan pembahasan di arena Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Aceh, pekan silam.

Terkait dengan itu, juga ada statement khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tentang komitmen Pemerintah Aceh soal usulan proyek pembangunan tahun 2019, serta sikap transparan kepada rakyat. “Hanya proyek yang masuk usulan Musrenbang yang akan direalisasikan,” kata Gubernur Irwandi.

Di bagian lain, kami juga menurunkan laporan perjalanan Gubernur Irwandi yang memimpin delegasi Aceh di Global Specialty Coffee Expo (GSCE), di Amerika Serikat. Orang nomor satu di Pemerintah Aceh itu membawa dua kepala daerah di Dataran Tinggi Gayo dalam kunjungan ini, yaitu Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Masih banyak liputan lain yang kami sajikan untuk Anda, sebagai jawaban atas keingintahuan rakyat atas kiprah mereka yang diberi amanah.

Kami sadar sebagai edisi pembuka, tentu banyak kekurangannya. Sebagai juru masak, kami mohon maaf atas racik yang belum sempurna. Kami akan terus menerima masukan dari Anda, untuk perbaikan di edisi berikutnya. Selamat membaca!



## Salam Redaksi

# Layanan Terintegrasi Menuju Aceh Sejahtera

**S**ALAH satu program unggulan Pemerintah Aceh pimpinan DR drh H Irwandi Yusuf (Gubernur) dan Ir H Nova Iriansyah MT (Wakil Gubernur), adalah Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu). Target utama dari program ini adalah pengembangan sistem informasi dan database yang terpadu ke semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Melalui SIAT, misi Pemerintah Aceh menyangkut data yang valid dan bisa digunakan untuk semua kepentingan masyarakat—terutama pelayanan—dan lintas instansi akan segera terwujud. Dalam konsep SIAT itu, peran sentral Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh (Diskominsa), terhitung sangat sentral.

Sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 14 tahun 2016, peran yang sangat vital disandang oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, dalam tataran lalu lintas informasi digital, termasuk di Aceh tentunya. Peran itu antara lain, sebagai penyedia infrastruktur data center, pengelola sub domain. Khusus untuk Aceh domainnya adalah acehprov.co.id.

Dalam kaitan sektor pelayanan itu, target paling awal direalisasikan adalah sistem terintegrasi dalam bidang pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Setidaknya ada tiga satuan kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang terlibat secara intens dalam layanan terintegrasi

itu, yaitu Diskominsa sebagai penyedia infrastruktur data center, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) sebagai penyedia data base kependudukan dan Dinas Kesehatan melalui RSUDZA sebagai operator layanan publik.

Integrasi ketiga SKPA itu menghasilkan sebuah sistem pelayanan yang sangat efektif, serta memberi manfaat langsung kepada jutaan rakyat Aceh selaku user atau penerima manfaat dari layanan publik. Betapa tidak, dengan data terintegrasi itulah, kini rakyat Aceh tak perlu lagi menenteng map atau bundel yang ribet saat memanfaatkan layanan RSUDZA, tapi cukup dengan hanya membawa KTP. Karena semua data pasien dan calon pasien telah tercover. Tentu saja harus mematuhi ketentuan perobatan secara berjenjang.

Satu hal yang pada era sebelum ini, terasa bagai menggantung asap atau bak mimpi Si Muin yang menendang periuk manis yang ia masak.

Semua kita harus menyadari, upaya tanpa henti untuk meningkatkan kinerja pelayanan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik, termasuk meminimalisir birokrasi dalam pelayanan itu sendiri.

Sejarah mencatat dengan tinta emas, ketika hari hari pertama Pemerintah Aceh (Irwandi-Nova) usai dilantik di Gedung DPRA, secara tegas Gubernur Irwandi menyatakan akan membuat perubahan revolusioner dalam bidang

pelayanan. Salah satunya adalah dengan langkah integrasi lintas SPKA, terutama menyangkut database. Dalam hal ini database kependudukan sebagai pilar utama untuk terwujudnya sistem layanan digital yang terintegrasi.

Sinergitas lintas sektoral untuk terwujudnya pelayanan prima di sektor kesehatan itu, benar benar menjadi angin sejuk bagi para pemakai jasa pelayanan kesehatan di Aceh. Kita berharap agar sinergitas itu bukan hanya sebatas RSUDZA, namun menjalar jauh hingga ke pelosok kabupaten/kota atau kecamatan sekalipun.

Sebuah langkah besar telah diraih, namun untuk kemaslahatan sebuah pelayanan itu sendiri, inovasi tiada henti harus tetap terus digelindingkan.

Terlepas dari semua itu, program SIAT adalah terobosan cemerlang yang layak didukung penuh oleh semua komponen di Aceh. Karena ini berkaitan langsung dengan kelancaran dan kenyamanan pelayanan di semua sektor, menyangkut semua lapisan masyarakat.

Data yang konkret serta terintegrasi pada semua lintas Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), menjadi kebutuhan dasar untuk terwujudnya pelayanan publik yang maksimal. Bukan hanya sekadar untuk program yang secara langsung bersentuhan dengan rakyat di tataran akar rumput, tapi juga untuk penanggulangan kebencanaan. Intinya adalah layanan terintegrasi menuju Aceh Sejahtera.

| Tabloid InfoAceh                                             |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Menuju Masyarakat Informasi                                  |                     |
| Gubernur Aceh                                                | Pelindung           |
| Wakil Gubernur Aceh                                          | Pelindung           |
| Sekretaris Daerah Aceh                                       | Pelindung           |
| Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh     | Pengarah            |
| Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh | Penanggung jawab    |
| Kepala Bidang Pelayanan Komunikasi Publik                    | Pemimpin umum       |
| Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik       | Pemimpin Redaksi    |
| Kepala Bidang Persandian                                     | Dewan Redaksi       |
| Kasi Hubungan Media                                          |                     |
| Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik                     |                     |
| Kasubbag Hukum Kepegawaian dan Umum                          | Sekretariat Redaksi |
| Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Asset                      |                     |
| Kasi Pengelolaan Informasi Publik                            |                     |
| Fesrianevalda, ST, M.Cs                                      | Informasi Teknologi |
| Ricky Alfins, SE, MM                                         |                     |
| Rahmad, ST                                                   | Photografer         |
| Dharwandura, A. Md                                           |                     |
| Rosma                                                        | Notulensi           |
| Siti Sundari, SE                                             |                     |

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Alamat Redaksi: Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Jl. STA Mahmudsyah No. 14 Kode Pos 23243 Banda Aceh. Email: diskominfo.acehprov.go.id

# Semua Usulan Harus Melalui Musrenbang

“Kalau ingin mengusul proposal proyek jangan lagi kepada pribadi gubernur, tapi usulkan program dan kegiatan 2019 melalui proses pembahasan Musrenbang 2018.”

drh. Irwandi Yusuf, M,Sc  
Gubernur Aceh

ORANG nomor satu di Pemerintah Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf, Senin (16/4) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), membuka Musyawarah Rencana Pembangunan 2018, sebagai bagian dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2019.

Ajang dengan pembicaraan utama soal dana belanja dan pembangunan Aceh 2019 itu diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota serta perangkat mereka di seluruh Aceh. Selain itu juga diikuti oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), terutama dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.

Dalam arahannya, Gubernur Irwandi kembali menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk tertib anggaran, sebagai bagian untuk terwujudnya clean

government dan good governance di Aceh. Konsekuensi dari itu semua adalah, dimulai dengan itikad baik semua pihak di Aceh untuk tertib dalam mengusul anggaran pembangunan. Semua usulan harus tertampung di dalam Musrenbang. “Kalau ingin mengusul proposal proyek jangan lagi kepada pribadi gubernur, tapi usulkan program dan kegiatan 2019 melalui proses pembahasan Musrenbang 2018.

Kepada seluruh stake holder kami beritahukan agar usulan kegiatan maupun proposal proyek dilakukan melalui Musrenbang,” tegas Irwandi pada pembukaan Musrenbang 2018, Senin (16/4).

Menurut Irwandi, semua usulan program dan kegiatan diinput dalam e planning yang terintegrasi dengan e budgeting, sehingga tidak ditemukan lagi usulan kegiatan baru yang selama ini dipersepsikan sebagai penumpang gelap.

Irwandi mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRA karena pokok pokok pikiran yang merupakan aspirasi masyarakat sudah diinput ke dalam e planning sehingga diharapkan penetapan APBA 2019 bisa tepat waktu.

Usulan program, kata Irwandi Yusuf, harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh, baik yang diusulkan SKPA, SKPK kabupaten/kota maupun usulan dari aspirasi masyarakat serta stake holders lainnya.

Dikatakannya, Pemerintah Aceh telah merumuskan tema RKPA 2019 yang selaras dengan



RKP Nasional yaitu Pembangunan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan delapan prioritas pembangunan Aceh.

Untuk mewujudkan delapan prioritas tersebut, Pemerintah Aceh akan menggunakan dua pola pendekatan yang terintegrasi yaitu based planning dan money follow program. Melalui dua pendekatan itu diharapkan dalam Musrenbang 2018 bisa menghasilkan program dan kegiatan yang tahun depan dan seterusnya bisa menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Aceh.

Gubernur Irwandi Yusuf

juga menyinggung pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Menurut Perpres 58 Tahun 2017, di Aceh terdapat tujuh PSN agar dapat dituntaskan walaupun sudah melewati masa pemerintahan saat ini.

Irwandi mengatakan, pemerintahannya dan kabupaten/kota mendukung lima program baru masuk ke dalam program prioritas nasional yang sudah diusul ke dalam aplikasi Simlaras. Di antaranya program pembangunan infrastruktur pendukung di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, pengendalian banjir Aceh Singkil, jalan lingkar Sinabang Sibigo,

pembangunan jalan lingkar Banda Aceh of ring road, percepatan kawasan strategis khusus dataran tinggi Gayo Alas, jalan tembus Jantho Keumala, pengendalian banjir Krueng Tripa dan Tamiang, dan pengembangan jaringan daerah irigasi Krueng Pase dan Alue Ubay.

Gubernur Irwandi berharap, pelaksanaan Musrenbang RKPA tersebut bisa mewujudkan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang berkualitas, menuju Aceh Hebat.

Kegiatan Musrenbang Aceh tahun 2018, diawasi secara langsung oleh Wagub Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT. (\*\*)

## Dirjen Dukcapil: Musrenbang Bukan Semata Formalitas

**D**IRJEN Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof. Dr. Zudan

Arief Fakhrrulloh meminta agar ajang Musrenbang yang menjadi ajang pembahasan secara kolektif kolegal lintas sektoral, untuk perencanaan pengang-

garan sebuah daerah, tidak dijadikan sebagai ajang yang sifatnya semata formalitas tapi justru sangat substansial.

Konteks itu makin terasa dibutuhkan, dengan kondisi pengangguran di Aceh yang mencatat angka lebih dari 14 persen dari jumlah tenaga kerja potensial. “Rencana Kerja Pembangunan (RKP) kita harus bisa membaca ke depan. Artinya masalah saat ini harus bisa dilihat dengan pendekatan saat ini pula,” kata Prof Zudan seraya menambahkan, dalam konteks tersebut, semua hal harus dimulai dengan perencanaan yang matang.

Menanggapi kebijakan delapan prioritas Pemerintah Aceh yang berkembang dalam Musrenbang 2018, Zudan mengatakan, kebijakan prioritas itu merupakan kebutuhan Aceh yang harus terimplementasi hingga ke pintu rumah masyarakat. “Ini tugas kita bersama

dan kita wajib mengimplementasikannya hingga ke level akar rumput.”

Sementara Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Muhammad Arif Tasrif, meminta agar pemangku kepentingan untuk memanfaatkan data secara lebih banyak. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun harus berdasarkan bukti di lapangan. Selanjutnya, untuk menanggulangi kemiskinan juga dibutuhkan komitmen dukungan politik. Hal itu menjadi syarat atau kunci untuk penanggulangan kemiskinan.

Melalui ajang Musrenbang RKPA 2019, Muhammad Arif Tasrif berharap, banyak program yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga kemiskinan dan pengangguran di Aceh segera bisa berkurang atau bahkan terentaskan. (\*\*)





# Jalan Awal Menuju Aceh Hebat



**M**USRENBANG tahun ini merupakan musrenbang pertama dalam masa kepemimpinan Irwandi - Nova untuk mewujudkan APBA yang berkualitas menuju Aceh hebat 2017-2022.

Dalam kaitan itu, Gubernur Irwandi telah meminta Bappeda Aceh untuk melakukan perbaikan pola pelaksanaan Musrenbang secara fundamental, karena Gubernur yakin "Aceh Hebat" tidak akan terwujud, bila tidak diawali dengan upaya perbaikan yang mendasar pada aspek perencanaan. Baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Aceh. "Pemerintah Aceh melalui Bappeda telah melakukan perbaikan pola pelaksanaan Musrenbang. Kini forum itu telah melewati tahapan persiapan yang juga diisi oleh forum konsultasi publik, pra pelaksanaan dan pelaksanaan Musren-

bang. Kami yakin, Aceh Hebat tidak akan terwujud jika tidak diawali pola perbaikan sejak perencanaan," kata Irwandi.

Adapun beberapa perubahan yang mendasar dari pelaksanaan musrenbang tahun ini antara lain;

1. Usulan program dan kegiatan tahun 2019 harus melalui proses pembahasan Musrenbang 2018, dan kepada seluruh stake holders agar tidak menyampaikan usulan kegiatan maupun proposal di luar forum Musrenbang.
2. Semua usulan program dan kegiatan harus diinput dalam e-Planning, yang Insya Allah tahun ini sistem tersebut akan terintegrasi dengan e-Budgeting. Sehingga tidak akan ditemukan lagi usulan kegiatan baru, yang selama ini dipersepsikan sebagai "penumpang gelap".

Dari kalangan DPRA, pokok

pikiran yang dikemukakan juga merupakan aspirasi masyarakat yang sudah diinput dalam e-Planning, sehingga penetapan APBA 2019 akan tepat waktu.

3. Usulan program dan kegiatan harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019, baik yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) maupun usulan dari aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Diharapkan APBA 2019 akan menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas dan komprehensif.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah merumuskan tema RKPA 2019 yang selaras dengan tema RKP Nasional yaitu "Pengembangan Kawasan Strategis dan Konektivitas

Untuk Pertumbuhan Berkualitas", dengan delapan prioritas pembangunan Aceh:

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.
3. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas.

4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi.
5. Penguatan Dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan.
6. Peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata.
7. Optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana, dan
8. Penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

Gubernur Irwandi berharap, tema dan skala prioritas tersebut tidak sekedar semboyan Musrenbang. Akan tetapi juga harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif dan terpadu dengan menggunakan pendekatan Evidence Based Planning dan Money Follow Program.

Kedua pendekatan ini diharapkan forum musrenbang ini mampu menghasilkan usulan kegiatan/proyek yang memiliki korelasi yang kuat dan pendanaan yang cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

Prioritas lainnya, adalah bagaimana agar pembangunan infrastruktur memiliki fungsi konektivitas antara wilayah dan antar sentra produksi dengan pasar, sehingga tidak adalagi wilayah di Aceh yang terisolir dan tertinggal akibat tidak adanya akses infrastruktur transportasi yang lancar. (\*\*)

## Beberapa usulan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang mendukung lima prioritas nasional yang sudah diusulkan secara online dalam aplikasi SIMLARAS;

- Infrastruktur pendukung di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
- Pengendalian banjir Kabupaten Aceh Singkil.
- Jalan Lingkar Sinabang-Sibigo
- BORR (Banda Aceh Of Ring Road)
- Percepatan Kawasan Strategis dan Khusus Dataran Tinggi Gayo-Alas
- Jalan Jantho-Keumala
- Pengendalian Banjir Kreung Tripa Dan Tamiang
- Pengembangan Jaringan Daerah Irigasi Krueng Pase Dan Alue Ubay.

## Capaian Program Pembangunan Aceh Tahun 2017

**B**ELANJA Aceh Tahun Anggaran 2017 yang direncanakan Rp 14,91 triliun lebih, realisasinya Rp.13,83 triliun lebih atau 92,76 persen, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp 7,42 triliun lebih, 4 realisasinya Rp 7,16 triliun lebih atau 96,55 persen dan Belanja Langsung direncanakan Rp.7,49 triliun lebih, realisasinya Rp 6,66 triliun lebih atau 89,01 persen.

Berikut ini keberhasilan dan capaian program

prioritas dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh, dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sesuai tugas pokok dan fungsinya:

### Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan jalan provinsi hingga tahun 2017 sepanjang 1.781,72 km. Dari keseluruhan jalan

tersebut terdapat 1.129,51 km atau 63,39% dalam kondisi mantap dan 652,21 km atau 36,61% dalam kondisi tidak mantap. Jembatan provinsi hingga tahun 2017 sepanjang 15.682 m, dalam kondisi mantap 12.947,06 m atau 82,56% dari target 94,15%.

Cakupan layanan jaringan irigasi tahun 2017 seluas 363.292 ha, di mana 65.409 ha (38 Daerah Irigasi) merupakan kewenangan provinsi yang terletak di 13 kabupaten/kota dan telah ditangani seluas 45.254 ha. Pada tahun 2017 juga telah direhab/ditingkatkan waduk/ embung sebanyak 15 unit di 7 kabupaten/kota. Pengaman pantai yang telah dibangun sepanjang 2,79 km dan jetty 1,04 km yang dapat mengamankan areal permukiman dan fasilitas umum lainnya dari abrasi dan ancaman banjir pasang purnama seluas 42 ha.

Selain itu, pengendalian banjir sungai akibat erosi tebing telah ditangani sepanjang 11 km, sehingga dapat mengamankan areal permukiman dan

fasilitas umum lainnya dari ancaman banjir luapan sungai seluas 5.958 ha.

Selanjutnya telah dilaksanakan pendataan kawasan perencanaan yang sudah terkoreksi, penyusunan masterplan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Agrowisata Dataran Tinggi Gayo dan juga pembebasan lahan untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Aceh telah meraih Juara I Lomba Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Aceh tahun 2017, telah membangun rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu dan fakir miskin 1.409 unit yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Seluruh rumah tersebut, alhamdulillah telah ditempati para penerima manfaat. Pemerintah Aceh juga membangun masjid/meunasah 178 paket, rehab masjid/meunasah 10 paket, dan pembangunan prasarana dan sarana masjid/meunasah yang berjumlah 138 paket.

### Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebanyak 271.931 siswa atau 60,81%, SD/MI/Paket A 619.370 siswa atau 104,41%, APK SMP/MTs/Paket B 282.628 siswa atau 104,06%, dan APK SMA/SMK/Paket C 236.016 siswa atau 86,04%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket 542.983 siswa atau 91,53%, APM SMP/MTs/Paket B 212.372 siswa atau 78,19%, dan APM SMA/SMK/Paket C 173.563 siswa atau 63,27%.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersalurkan untuk SD/SMP dan pendidikan khusus Rp.596,58 milyar lebih dengan penerima manfaat pada triwulan IV 695.361 siswa, sedangkan untuk SMA/SMK dan Pendidikan Khusus Rp.29,23 milyar lebih dengan penerima manfaat pada triwulan IV 24.603 siswa.

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun turut didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana, dengan membangun gedung sekolah/dayah dan menambah ruang kelas sekolah/dayah.

Selain itu dibangun juga asrama sekolah/dayah, laboratorium dan ruang praktikum, taman sekolah, prasarana dan sarana sekolah/dayah, lapangan upacara, fasilitas parkir, dan pembangunan ruang ibadah.

Selanjutnya dibangun ruang belajar, alat praktik dan peraga sekolah, mebeler sekolah, sosialisasi serta pelatihan. Urusan ini juga didukung dengan memberikan beasiswa kepada siswa/santri yang berprestasi, siswa/santri tidak mampu/yatim/piatu, santri muallaf yang berprestasi serta memberikan insentif kepada guru dan teungku dayah se-Aceh.

### Urusan Kesehatan

Tahun 2017 angka kematian bayi sebanyak 10/1.000 lahir hidup (LH), turun dari tahun 2016 sebanyak 12/1.000 LH. Angka kematian ibu melahirkan tahun 2017 sebanyak 143/100.000 LH, turun dari tahun 2016 sebanyak 167/100.000 LH. Angka kematian balita tahun 2017 sebanyak 11/1.000 LH, turun dari tahun 2016 sebanyak 13/1.000 LH.

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2017 sebesar 23%, sedangkan umur harapan hidup (UHH) tahun 2017 mencapai 69,51 tahun. Pada tahun 2017 rasio dokter umum per satuan penduduk sebesar 27/100.000. Angka ini lebih baik dari tahun 2016 sebesar 24,7/100.000. Tahun 2017 rasio dokter spesialis per satuan penduduk sebesar 15,9/100.000, angka ini lebih baik dari tahun 2016 sebesar 11,3/100.000.

Rasio dokter gigi per satuan penduduk sebesar 5/100.000, lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4,7/100.000 penduduk. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2017 sebesar 76%, sedangkan tahun 2016 sebesar 63%. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%,? angka kesuksesan pengobatan TB sebesar 89%, angka kejadian (incident rate) DBD sebesar 49/100.000.

Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap



eliminasi malaria sebanyak 19 kabupaten/kota, sedangkan persentase Gampong Siaga Aktif mencapai 42%. Pasien pasung yang dibebaskan tahun 2017 sebanyak 54 orang atau 41,5% dari total 122 kasus, pasien yang sembuh klinis (drooping) 660 orang, home visite 16 kali kunjungan, integrasi 15 kali kunjungan, persentase orang dengan gangguan jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang mandiri sebanyak 52%.

Puskesmas terakreditasi 107 dari 342 puskesmas atau 31%, rumah sakit pemerintah terakreditasi 21 dari 27 rumah sakit atau 77,78%. Pada tahun 2017, Pemerintah Aceh mulai membangun dan pengembangan tiga dari lima rumah sakit rujukan regional masing-masing di Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Aceh Tengah.

Selain itu, juga dibangun gedung rawatan RSU Tgk. Chik Di Tiro di Sigli, gedung poliklinik dokter RSU Meuraxa di Banda Aceh, gedung Program Studi Kebidanan Poliklinik Kesehatan Aceh. Tahun 2017, Pemerintah Aceh juga mulai membangun gedung pusat pengobatan kanker dan penambahan ruang operasi di RSUDZA, serta pembangunan ruang rehabilitasi psikotik di RSJ.

Selain itu telah dilaksanakan pengadaan alat-alat kesehatan, penyediaan 270 kursi roda, dan berbagai pelatihan, serta pelaksanaan rapat koordinasi untuk meningkatkan kinerja petugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Aceh merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang telah Universal Health Coverage (UHC), seluruh penduduk Aceh telah memperoleh fasilitas jaminan kesehatan.

Program ini masih menjadi unggulan dan akan terus ditingkatkan kualitas pelayanannya, antara lain dengan membentuk tim terpadu JKA Plus untuk membantu penyelesaian administrasi pelayanan pada saat pasien datang berobat, cukup dengan memperlihatkan kartu JKA atau KTP saja.

Tahun 2017 jumlah penduduk Aceh dibayar premi JKA oleh Pemerintah Aceh tercatat 2.009.031 jiwa dan 996 orang di antaranya dirujuk ke rumah sakit di luar Aceh dengan menggunakan fasilitas JKA. Total anggaran yang tersedia untuk program JKA tahun 2017 sebesar Rp.562,98 miliar lebih.

Di bidang pelayanan kesehatan, Pemerintah Aceh telah memperoleh prestasi Peringkat Ketiga Nasional dalam Kompetisi e-Aspirasi (Anugerah Situs Sehat Inspirasi Sehat) dari Menteri Kesehatan RI, Akreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari Komisi Akreditasi Nasional, Peringkat Pertama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 dari Komisi Informasi Aceh

### Urusan Sosial

Dalam upaya pemberdayaan fakir miskin, Pemerintah Aceh telah memberikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 190 kelompok, bantuan bahan bangunan rumah untuk rehabili-

tasi rumah tidak layak huni (RTLH) kepada 777 kepala keluarga (KK), bantuan usaha ekonomi produktif kepada para keluarga rentan sebanyak 362 KK dan 38 orang lanjut usia.

Juga diberikan pelatihan keterampilan kepada 367 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan 40 anak korban narkoba berupa praktik belajar kerja plus bantuan usaha produktif. Pembinaan anak telantar diprioritaskan untuk peningkatan kebutuhan dasar, melalui bantuan makanan kepada 6.000 anak selama 270 hari di panti asuhan.

Selanjutnya, diberikan bantuan advokasi hukum bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebanyak 50 orang. Selain bantuan advokasi hukum, juga dilakukan pembinaan terhadap para penyandang cacat, pemberdayaan ekonomi eks penderita kusta dalam/luar permukiman berupa pemberian jaminan hidup (jadup), serta bantuan usaha ekonomi produktif untuk 65 orang selama dua bulan.

Selanjutnya 80 panti (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi), mendapatkan bantuan prasarana dan sarana sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani 15.696 orang dan korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat 508.386 orang.

### Urusan Tenaga Kerja

Angkatan kerja di Aceh tahun 2017 berjumlah 2,28 juta orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 2,25 juta orang. Penduduk yang bekerja tahun 2017 berjumlah 2,13 juta orang, bertambah dari tahun 2016 yang hanya 2,08 juta orang.

Pengangguran tahun 2017 tercatat 150 ribu orang, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 171 ribu orang atau berkurang sekitar 21 ribu orang. Untuk pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan baik bagi pekerja maupun pengusaha telah diselesaikan 17 kasus dan 3 kasus telah diteruskan ke pengadilan.

Pemerintah Aceh juga telah mengirimkan 23 orang yang berasal dari 23 kabupaten/kota untuk magang ke Jepang selama tiga tahun dengan harapan dapat menciptakan wirausaha baru secara mandiri.

### Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembinaan kelembagaan mukim telah dilakukan kepada 803 mukim dan juga turut diberikan biaya operasional imuem mukim sebesar Rp.500.000 per bulan untuk 799 imuem mukim. Pemerintah Aceh juga melakukan bedah rumah untuk 67 unit sehingga menjadi rumah layak huni di 14 kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah Aceh juga memberikan uang jajan dan biaya manajemen kepada 46 TK/RA serta bantuan penyediaan makanan tambahan anak sekolah kepada 2.316 murid.

Selain dari hal tersebut di atas, telah dilak-



sanakan pembinaan, pelatihan, dan rapat koordinasi/ rapat teknis kepada para perangkat gampong dan warga gampong untuk menunjang peningkatan pembangunan gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong. Juga dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah.

Dana desa yang diterima sebesar Rp.4,89 triliun lebih, realisasinya Rp.4,79 triliun lebih atau 97,99%, dengan rincian untuk tahap pertama telah dikucurkan untuk 6.495 gampong, sedangkan tahap kedua hanya dikucurkan untuk 6.173 gampong. Hal ini disebabkan oleh adanya gampong yang tidak menetapkan APB-Des akibat konflik antara perangkat gampong dan tuha peuet di samping adanya gampong yang tidak menyerahkan laporan tentang penggunaan APBDes.

Pemerintah Aceh juga menyumbangkan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) sebanyak 68,66 juta kilogram lebih kepada 6.496 gampong. Selain itu, telah dibangun 28 kantor geuchik dan balai pertemuan di empat kabupaten, pengadaan mebel pada 85 gampong di empat kabupaten.

Selanjutnya telah dilakukan pembinaan 6.497 PKK aktif dan 7.011 Posyandu aktif. Pemerintah Aceh memperoleh penghargaan juara II Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) kategori TTG Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2017 serta penghargaan 10 besar Posyantek Berprestasi Tingkat Nasional yang diraih oleh Posyantek Tunggulun Aceh Tamiang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

## Urusan Pertanian

Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat dan hasil produksi pertanian, telah melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya pemberian pupuk 3.000.050 kg, pengadaan cadangan benih daerah 185.000 kg, pengadaan saprodi padi inbrida untuk mendukung Penas KTNA 1.000 ha, pengadaan saprodi jagung hibrida 5 ha, dan pupuk organik cair untuk peningkatan produksi tanaman pangan 1.110 liter.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilakukan dengan pemberian bantuan pestisida 4.200 liter, sehingga dapat menekan serangan hama tanaman. Di samping itu, juga dilakukan perluasan areal tanam padi 317 ha di lima kabupaten. Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha olahan pangan, disediakan peralatan pendukung pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani, kelompok Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), perajin, mekanik, dan operator alsintan.

Peralatan yang diberikan berupa 6 unit traktor besar 4WD, 10 unit traktor sedang 4WD, 33 unit hand tractor rotary, dan 1 unit revator. Selain itu, juga dilatih cara mengoperasikan peralatan yang telah diberikan.

Selanjutnya dilakukan pengadaan bibit ung-

gul pertanian/perkebunan berupa mangga, jeruk, lengkeng, manggis, sirsak, alpukat 8.250 batang, bibit kelapa sawit 39.150 batang, bibit karet 58.500 batang. Selanjutnya untuk mendukung akses menuju kawasan pertanian, telah dilakukan pembukaan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 1.480,2 meter.

Optimalisasi lahan sebesar 283,12 ha. Tahun 2017 produksi pertanian tanaman pangan menunjukkan angka yang mengembirakan. Untuk padi tercapai 2,65 juta ton lebih, jagung 361,15 ribu ton lebih, kedelai 6,8 ribu ton lebih, kacang tanah 2,47 ribu ton lebih, kacang hijau 771 ton, ubi kayu 29,17 ribu ton lebih, dan ubi jalar 6,95 ribu ton lebih.

Sedangkan produksi komoditas hortikultura antara lain bawang merah 8,5 ribu ton lebih, kentang 50,21 ribu ton lebih, cabai merah 50,53 ribu ton lebih, cabai rawit 46,77 ribu ton, pisang 51,11 ribu ton lebih, jeruk besar 11,84 ribu ton lebih, durian 12,45 ribu ton lebih, dan rambutan 10,12 ribu ton lebih.

Selanjutnya untuk produksi tanaman perkebunan antara lain karet 67,81 ribu ton lebih, kelapa sawit 658,81 ribu ton lebih, dan kakao 74,33 ribu ton lebih. Produksi peternakan terdiri atas produksi daging sapi 10,71 juta kg lebih, kerbau 3,22 juta kg lebih, kambing 2,87 juta kg, dan domba 81,83 ribu kg lebih.

Selain itu, produksi ayam buras tercatat 12,02 juta kg lebih, ayam ras petelur 353,89 ribu kg lebih, ayam ras pedaging 7,28 juta kg lebih, itik 1,94 juta kg lebih, telur 18,32 juta kg lebih, dan populasi ternak per tahun 16,27 juta ekor lebih. Selain dari yang tersebut di atas, juga telah dilakukan pengobatan terhadap 766.065 ekor ternak, pemberian vaksin kepada 424.852 ekor, penanggulangan gangguan reproduksi untuk 3.504 ekor.

Juga dilakukan pengadaan sapi 1.474 ekor dan kambing 774 ekor, serta pembangunan dan renovasi lahan pakan hijauan makanan ternak seluas 20 ha.

Di ajang Penas KTNA XV, Aceh memperoleh sejumlah penghargaan antara lain: juara I kategori Agribisnis Tanaman Pangan, juara I kategori Agribisnis Hortikultura, juara I kategori Agribisnis Perkebunan, dan penghargaan di bidang peternakan oleh Kementerian Pertanian atas Penetapan Rumpun Kerbau Gayo.

## Urusan Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Aceh terus melakukan perluasan jaringan komunikasi. Pada tahun 2017 jaringan komunikasi yang berhasil dicapai 70 unit/station, angka ini melebihi dari yang ditargetkan 44 unit/station dan memiliki 24 domain yang tersebar di SKPA.

Pemerintah Aceh memperoleh penghargaan peringkat tiga kategori Pemerintah Provinsi Dalam Hal Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 yang diserahkan Bapak Wakil Presiden RI.

## Urusan Penanaman Modal

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pendapatan Aceh bidang perizinan, telah diterbitkan dokumen izin dan non izin sebanyak 3.693 dokumen. Realisasi investasi dari 31 perusahaan PMA 11,2 juta USD lebih, realisasi investasi dari 336 perusahaan PMDN Rp.1,68 triliun lebih. PMA berasal dari beberapa negara yaitu: gabungan negara, RRC, Malaysia, Inggris, Singapura, Australia, Belanda, Uni Emirat Arab, Perancis, dan Korea Selatan.

## Urusan Perhubungan

Tahun 2017 telah dilakukan rehab lima terminal tipe B dan pembangunan fasilitas pendukung empat terminal. Selanjutnya telah dilaksanakan pembangunan lanjutan pelabuhan, rehab sarana dan prasarana pelabuhan, pengadaan sarana penunjang pelabuhan, dan pembangunan jetty. Selain itu dilakukan pengadaan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat, perawatan dan pemeliharaan kapal, pemeliharaan sarana pelayaran.

Juga dilakukan pembangunan dan rehab prasarana dan sarana bandara, pengadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, dan traffic light untuk kelancaran lalu lintas termasuk pada saat mudik dan arus balik.

## Urusan Pertanahan

Dalam upaya percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional (PPSN) telah dilakukan monitoring dan upaya mediasi terhadap pengadaan tanah untuk jalan Tol Trans Sumatera ruas SigliBanda Aceh sepanjang “75 km, Waduk Keureutoe, Waduk Tiro, Waduk Rukoh, jaringan irigasi D.I Jambo Aye Kanan dan jaringan irigasi D.I Lhok Guci.

Selanjutnya, untuk kebutuhan berbagai pembangunan infrastruktur telah dilakukan pengadaan tanah sebanyak 19 lokasi. Pemerintah Aceh telah menginventarisir dan memfasilitasi untuk penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sebanyak 23 kasus.

## Urusan Pangan

Dalam penanganan kasus rawan pangan, telah dilakukan penanganan terhadap 1.200 kasus rawan pangan kronis dengan memberikan bantuan bahan pangan senilai Rp.2 juta per kasus.

Di samping pemberdayaan 60 kelompok tani di daerah rawan pangan transien dan pelatihan untuk 60 tenaga penyusun peta kerawanan pangan. Selain itu, dilakukan pemberdayaan masyarakat kawasan mandiri pangan di 10 kecamatan

Berikutnya, telah dilaksanakan pengawasan terhadap 16 pelaku usaha yang disertifikasi atau teregistrasi dan pengujian terhadap 118 sampel pangan segar. Hal ini bertujuan demi terjaminnya keamanan pangan segar dari cemaran kimia dan mikrobiologi.

Pemberdayaan lumbung pangan telah dilakukan melalui kegiatan pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan pemerintah dengan capaian ketersediaan cadangan pangan 100 ton beras dan pemberdayaan 25 gapoktan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, terutama gabah/beras.

Selain itu dilakukan pelatihan 1.020 aparaturnya pertanian dan tenaga penyuluh dengan harapan untuk meningkatkan status penyuluh menjadi terakreditasi.

## Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan mencapai 307,88 ribu ton lebih, terdiri atas produksi perikanan tangkap 208,34 ribu ton lebih atau 67,67% dan produksi perikanan budi daya 99,53 ribu ton lebih atau 32,33%.

Jumlah konsumsi ikan terus meningkat. Untuk tahun 2017 jumlahnya mencapai 120,49 kg/tangkapan. Angka ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 42,66 kg/tangkapan. Pencapaian jumlah konsumsi ikan dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi gemar makan ikan sehingga masyarakat mengerti betapa pentingnya mengonsumsi ikan untuk pertumbuhan dan kecerdasan.

Tingkat produksi perikanan kelompok nelayan pun meningkat, mencapai 195,58 ribu ton lebih pada tahun 2017. Tingkat kesejahteraan nelayan diukur dengan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2017 mencapai 97,17 NTN.

Peningkatan itu juga didukung melalui pembinaan kepada 86 kelompok nelayan. Meningkatnya



produksi perikanan tidak lepas dari beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain mencegah dan menindak illegal fishing, ditandai dengan ditangkapnya 2 kapal ikan asing dan 3 kapal trawl. Selain itu diintensifkan patroli bersama dan sosialisasi kepada nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang tak ramah lingkungan.

Selain itu, telah dilakukan pengadaan bibit ikan, pakan, alat tangkap, pembangunan dan rehab fasilitas pelabuhan perikanan.

### Urusan Kehutanan

Dalam rangka pengembangan hutan tanaman dan hutan alam telah ditanami bibit kapur, pala, Multi Purpose Tree Species (MPTS), jengkol, jabon, ketapang dan bibit tanaman kehutanan di lahan seluas 180,18 ha, dengan jumlah bibit 73.905 batang.

Selain penanaman juga dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik 215.769 kg, kompos 1.400 kg, dan pangadaan benih 14 paket. Selanjutnya dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu dan nonkayu sebagai sumber pendapatan masyarakat, telah ditanam 467.844 batang bibit tanaman di lahan seluas 1.262 ha.

Melalui gerakan rehabilitasi hutan dan lahan telah direalisasikan penanaman 536.008 bibit jati dan jabon di lahan seluas 1.314 ha. Untuk pengembangan kawasan hutan telah ditanami 151.254 bibit tanaman kehutanan di lahan seluas 105 ha.

### Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemerintah Aceh secara intensif berupaya meminimalisir lokasi Pertambangan Tanpa Izin (Peti) melalui upaya koordinasi dengan pemerintah kabupaten yang memiliki Peti, yakni Kabupaten Pidie, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Tengah yang dibuktikan dengan telah berhasil dikurangi 20 ha Peti di Pidie, bahkan pelakunya telah dihukum.

Pengembangan energi terbarukan telah dilakukan dengan studi kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 6 kabupaten, Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Angin dan Surya di Aceh Besar, serta pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU-TS) 30 unit, rehab LPJU-TS 28 unit, dan pembangunan instalasi biogas 16 unit.

Selanjutnya telah dilakukan pemasangan lampu PJU 1.118 unit, tiang 234, pemasangan listrik 2 Ampere 1.203 unit dan pengadaan genset 51 unit. Pemerintah Aceh juga membangun sumur bor di 103 lokasi untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan dan diprioritaskan ketersediaannya pada fasilitas umum.

### Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam upaya monitoring dan penertiban administrasi kependudukan, di Aceh telah diterbitkan akta

kelahiran untuk 381.827 balita dari 469.037 total kelahiran. Perekamannya Kartu Tanda Penduduk Aceh berbasis NIK terus berlangsung. Berdasarkan data yang dihimpun dari kabupaten/kota tercatat sudah 2.878.862 jiwa penduduk Aceh memiliki KTP-el dari 3.513.837 jiwa total penduduk yang wajib memiliki KTP.

Selain itu, dari 2.143.048 pasangan yang wajib memiliki akta nikah, 514.447 pasangan di antaranya sudah memiliki buku nikah. Rendahnya jumlah masyarakat yang tidak memiliki akta nikah di Aceh disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga untuk segera mengurus aktanya yang hilang, di samping masih banyaknya pasangan yang menikah di masa konflik atau di awal pascatsunami yang tidak dicatatkan.

Untuk menambah jumlah pasangan yang wajib memiliki akta nikah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kementerian Agama kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan isbat nikah untuk 350 pasangan yang tersebar di tujuh kabupaten.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran tidak terlepas dari aktifnya Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota dan lembaga swasta terkait memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian belum cukup mengembirakan. Sejauh ini di Aceh telah diterbitkan akta kematian untuk 16.398 orang meskipun jumlah pen-

duduk yang meninggal diperkirakan lebih banyak.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian, di beberapa kabupaten/kota disediakan uang duka bagi ahli waris yang mengurus akta kematian.

### Urusan Perindustrian

Dalam rangka membuka akses pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM), telah dipromosikan produk IKM di Pekan Raya Jakarta, Pameran Inacraft, Sail Sabang Expo, Promosi Makanan Tradisional Aceh dan Handycraft di Brunei Darussalam.

Dalam membina 1.170 pelaku usaha IKM, telah diberikan bantuan sarana penunjang berupa mesin/peralatan kepada 39 IKM dan 3 unit kontruksi fisik serta promosi produk kerajinan binaan dekranas. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pengawasan industri agro, kimia dan aneka industri melalui pelatihan, sosialisasi dan workshop yang dilakukan terhadap 130 pelaku usaha dan 60 aparatur pembina.

### Urusan Perdagangan

Untuk meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa di sekolah-sekolah telah dilakukan pemberdayaan konsumen kepada anak didik dan guru di empat kabupaten/kota serta pelatihan motivator perlindungan konsumen bagi aparatur.

Tahun 2017 telah dibangun prasarana dan sarana perdagangan sebanyak 2 unit pasar rakyat, 3 unit revitalisasi pasar terpadu dan 1 kajian teknis jaringan distribusi logistic Aceh. Jumlah nilai ekspor non migas Aceh direncanakan senilai US\$100.000.000, realisasinya US\$114.392.773,06 atau 114,33%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan tingginya permintaan Ekspor Batu Bara.

### Urusan Lingkungan Hidup

Pemantauan pencemaran status mutu air dilakukan di 8 sungai dan 2 danau. Hasil analisa pengujian air oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menunjukkan kualitas air sungai tercemar ringan dan air danau di bawah kondisi baku.

Berdasarkan hasil laboratorium, kondisi udara hasil buangan pabrik dan kendaraan bermotor (ambient) di 17 kabupaten/kota menunjukkan kualitas udara pada lokasi pengujian dalam kondisi baik, sesuai dengan parameter pengujian.

Selain itu, dilakukan pengawasan limbah B3 terhadap 44 unit usaha dan pelaksanaan pengawasan pada 13 unit usaha yang wajib analisa dampak lingkungan.

Pemerintah Aceh memperoleh penghargaan berupa Penilaian Kinerja Perusahaan terhadap Pengelolaan Lingkungan dengan Kategori Emas Terbaik I, Kategori Hijau Terbaik II dan Kategori Biru Terbaik III dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI.(\*\*)



# Aceh Tuan Rumah PON 2024



**ACEH-Sumut** ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXI Tahun 2024, setelah menyisihkan dua calon lainnya, Bali-NTB dan Kalimantan Selatan. Penetapan Aceh-Sumut itu dicapai dalam sidang Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (24/4).

Dalam pemungutan suara yang diikuti KONI dari 34

provinsi, Aceh-Sumut memperoleh 24 suara, Bali-NTB 8 suara, dan Kalsel 2 suara.

Bagi Tanah Rencong, keberhasilan ini merupakan penebusan kegagalan ketika bidding PON 2014. Kala itu, Aceh harus puas di peringkat kedua dengan 46 suara, sementara Bali juga dengan 46 suara. Namun, provinsi di ujung timur Indonesia, Papua berhasil menang setelah mengantongi 64 suara.

Sementara bagi Sumut, kemenangan dari hasil bidding ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 65 tahun, untuk kembali menjadi tuan rumah, setelah PON III tahun 1953.

Beda dengan bidding PON kali ini, penetapan tuan rumah pesta olahraga multi event dilakukan oleh KONI provinsi saja. Sementara dalam pene-

tapan PON 2014, tuan rumah ditentukan oleh KONI provinsi dan Pengurus Besar (PB) Olahraga.

Terpilihnya Aceh-Sumut menjadi tuan rumah bersama, merupakan sejarah baru bagi pelaksanaan PON. Beta-pa tidak, sejak PON pertama digelar di Stadion Sriwedari Solo, Surakarta, Jawa Tengah, tahun 1948, tuan rumah hanya satu daerah saja. Tapi, kali ini, babak baru penyelenggaraan PON tercipta ketika Aceh-Sumut menjadi tuan rumah bersama.

Bila Aceh menjadi tuan rumah PON untuk edisi pertama, maka Sumut terpilih sebagai penyelenggara untuk kedua kalinya. Ya, seperti diketahui, Medan pernah menjadi tuan rumah PON pada 20-27 September 1953. Memang, pada bidding PON 2014, mereka juga maju bersama Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Namun, Sumut langsung tereeliminasi di putaran pertama.

Wakil Ketua Umum IV KONI Inugroho berharap Aceh-Sumut bisa langsung mempersiapkan diri untuk bisa memberikan pelayanan terbaik sebagai tuan rumah. Jika tidak, Bali - NTB dan Kalsel siap menggantikannya.

Aceh bersama Sumut harus segera melakukan persiapan sedini mungkin dan berkoordinasi dengan segala pihak terkait. Keputusan mulai berlaku sejak 24 April,” kata Inugroho usai memimpin Musornaslub.

Terpilihnya Aceh-Sumut menjadi tuan rumah bersama merupakan sejarah baru bagi pelaksanaan PON. Beta-pa tidak, sejak PON pertama digelar di Stadion Sriwedari Solo, Surakarta, Jawa Tengah, tahun 1948, tuan rumah hanya satu daerah saja. Tapi, kali ini, babak baru penyelenggaraan PON tercipta ketika Aceh-Sumut menjadi tuan rumah bersama.

Menyusul keputusan itu, Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman menyampaikan ucapan selamat kepada Aceh-Sumut yang telah mendapatkan kepercayaan oleh forum bidding. Di mana, mayoritas KONI daerah lebih memilih dua provinsi di ujung Pulau Sumatera tersebut.

“Secara bersama-sama kita telah menyaksikan bahwa yang terpilih adalah Aceh dan Sumatera Utara. Sekali lagi selamat bagi kedua provinsi ini,” demikian Tono Suratman. (msm)

## Gubernur: Wajar Kali Ini PON di Ufuk Barat

- Wagub Nova Iriansyah: Kita Siapkan Venue
- Ketua KONI Aceh: Kita Siapkan Lahan 2500 Hektar

**KOMITMEN** perjuangan Pemerintah Aceh untuk terwujudnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 di Aceh, benar benar terbukti dan tak diragukan lagi. Gubernur Aceh, drh Irwandi Yusuf datang ke arena uji akhir bidding PON itu langsung dari rumah, tempat ia masih dirawat. “Saya cabut infus di tubuh saya, agar saya bisa datang ke sini,” cerita Irwandi.

Orang nomor satu Aceh itu mengaku sedang dirawat di rumah sakit dan memaksakan diri hadir ke arena sidang bidding PON, semata-mata untuk memberi dukungan kepada olahraga nasional.

Gubernur Irwandi Yusuf merasa gembira dengan perolehan suara Aceh-Sumut tersebut. “Alhamdulillah, semuanya berlangsung dengan baik,” kata gubernur yang langsung menuju Bandara Cengkareng untuk selanjutnya kembali ke Banda Aceh.

Gubernur Irwandi dan Wagub Sumut, Nurhajizah Marpaung sebelumnya memaparkan kesiapan Aceh-Sumut sebagai tuan rumah. “Aceh pernah jadi modal Indonesia, jangan dilupakan itu. Sekarang pun Aceh jadi ibu olahraga nasional,” kata Irwandi penuh semangat.

Gubernur Aceh yang baru kembali dari Amerika ini menjanjikan sejumlah fasilitas gratis kepada peserta PON. “Akomod-

sasi, konsumsi, dan transportasi lokal kami siapkan gratis,” teriak Irwandi dari podium. Tawaran itu disambut tepuk tangan meriah peserta rapat.

Irwandi juga menjanjikan biaya transportasi dari daerah masing-masing pulang pergi sebesar 30 persen. “Kalau saya tahu ukuran baju peserta PON, itu juga saya gratiskan,” tukas Irwandi Yusuf.

Lebih jauh Gubernur Irwandi memaparkan, setelah PON XX/2020 di ufuk timur Indonesia, Papua, maka sangat wajar jika PON XXI/2024 dihelat di ufuk barat republik ini, yaitu Aceh-Sumut. “Aceh bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. PON XXI/2024 tidak hanya untuk Aceh-Sumut tapi juga untuk peningkatan prestasi olahraga secara nasional,” ujar Gubernur Irwandi.

Bagi Pemerintah Aceh sendiri, pelaksanaan pesta olahraga multi event PON 2024, adalah bagian dari upaya untuk mendorong perekonomian dan pariwisata.

Siapkan Venue

Secara terpisah, Wagub Aceh Ir Nova Iriansyah MT, Ketua Tim Bidding PON Aceh mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran di Aceh, terutama seluruh Panitia Bidding PON Aceh, yang telah bekerja keras melakukan rangkaian persiapan. Baik dalam bentuk konsep maupun penyiapan awal saran

dan prasarana, sebagai kelengkapan persyaratan terpilih menjadi tuan rumah. “Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk menyukseskan persiapan, sehingga Aceh ditetapkan sebagai tuan Rumah PON. Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Aceh Hebat yaitu Aceh Teuga,” tutur Wagub Nova seraya menambahkan, Aceh bersama Sumatera Utara siap melaksanakan even PON ke- 21. Khusus bagi masyarakat Aceh, ini adalah even yang sangat penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Pada sisi lain Ketua Tim Bidding PON Aceh itu menambahkan, langkah awal yang ditempuh Pemerintah Aceh adalah melengkapi venue yang dibutuhkan, serta sesuai dengan syarat dan standar PON tentunya.

Total ada 24 venue yang disiapkan dan tersebar di sejumlah daerah. Selain itu, berbagai fasilitas pendukung juga masih terus dipacu seperti transportasi laut, udara dan darat, fasilitas kesehatan dan keamanan. “Di Aceh ada sejumlah kabupaten/kota yang akan dilibatkan sebagai lokasi penyelenggaraan PON, untuk pembangunan sarana dan prasarana masih punya waktu untuk menyelesaikannya,” tutur Wagub Aceh itu.

**Lahan 2500 hektar**

Di bagian lain, Ketua Umum

KONI Aceh Muzakir Manaf juga menyatakan rasa syukurnya atas ditetapkannya Aceh sebagai tuan rumah PON ke-21 bersama Sumut. “Meski masih butuh waktu 5-6 tahun ke depan, kami sudah memiliki rencana, menyiapkan lahan 2.500 hektar di Kabupaten Aceh Besar, untuk membangun perkampungan atlet, sport center, kampus, dan sarana pendukung lainnya,” kata Muzakir Manaf yang

akrab disapa Mualem itu.

Bukan hanya itu, Aceh akan memanfaatkan jatah 28 cabor untuk penyelenggaraan, dengan menyesuaikan prestasi terbaik di daerah masing-masing. Hingga nantinya atlet yang berlaga di depan pendukungnya akan lebih berkemungkinan meraih prestasi. Bahkan saat ini persiapan atlet juga telah mulai dilakukan secara berkelanjutan. “Untuk anggaran, persiapan untuk kedua daerah diperkirakan sekitar Rp 3 triliun. Selain cabor - cabor unggulan, Kita (Aceh) mendapatkan kesempatan menggelar opening ceremony. Untuk penutupan akan berlangsung di Medan,” ungkap Muzakir Manaf yang juga mantan Wagub Aceh ini. (msm)

### DAFTAR TUAN RUMAH PON

| PON   | TAHUN | TUAN RUMAH                    |
|-------|-------|-------------------------------|
| I     | 1948  | Solo (Jawa Tengah)            |
| II    | 1951  | Jakarta (DKI Jakarta)         |
| III   | 1953  | Medan (Sumatera Utara)        |
| IV    | 1957  | Makassar (Sulawesi Selatan)   |
| V     | 1961  | Bandung (Jawa Barat)          |
| VI    | 1965  | Dibatalkan karena G30S        |
| VII   | 1969  | Surabaya (Jawa Timur)         |
| VIII  | 1973  | Jakarta (DKI Jakarta)         |
| IX    | 1977  | Jakarta (DKI Jakarta)         |
| X     | 1981  | Jakarta (DKI Jakarta)         |
| XI    | 1985  | Jakarta (DKI Jakarta)         |
| XII   | 1989  | Jakarta (DKI Jakarta)         |
| XIII  | 1993  | Jakarta (DKI Jakarta)         |
| XIV   | 1996  | Jakarta (DKI Jakarta)         |
| XV    | 2000  | Surabaya (Jawa Timur)         |
| XVI   | 2004  | Palembang (Sumatera Selatan)  |
| XVII  | 2008  | Samarinda (Kalimantan Timur)  |
| XVIII | 2012  | Pekanbaru (Riau)              |
| XIX   | 2016  | Bandung (Jawa Barat)          |
| XX    | 2020  | Jayapura (Papua)              |
| XXI   | 2024  | Aceh-Sumut (Banda Aceh-Medan) |

# Kopi Gayo dari Aceh untuk Dunia



**G**UBERNUR Aceh Irwandi Yusuf memimpin delegasi Aceh di Global Specialty Coffee Expo (GSCE), di Amerika Serikat. Dia membawa dua kepala daerah di Dataran Tinggi Gayo dalam kunjungan ini, yaitu Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Sejumlah pejabat seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Ir. Iskandar

M.Sc, Plt. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Aceh, Amiruddin, Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadani, pengusaha dan petani kopi, Barista Aceh ikut menghadiri expo tersebut dalam rangka mempromosikan Aceh dengan segala potensi alamnya yang layak dijual di pasar global, khususnya kerjasama bidang Industri pariwisata, agroindustri (kopi), energi dan infrastruktur serta Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan

Bebas Sabang serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Irwandi menjadikan pertemuan ini sebagai alat untuk memperkenalkan dan menjual kopi asal Aceh dan sejumlah potensi investasi yang ada di Aceh. Dari acara ini, Pemerintah Aceh juga berharap dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Aceh. Semua bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.

Global Specialty Coffee Expo (GSCE), merupakan sebuah forum kopi terbesar di dunia dihadiri oleh para pelaku industri kopi dunia yang kembali digelar pada tanggal 19 - 22 April 2018 di Seattle, Amerika Serikat.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan, Aceh dengan segala komoditi alamnya yang sudah dikenal di manca negara berkepentingan untuk hadir pada berbagai acara expo internasional, khususnya Global Specialty Coffee Expo ini.

“Saya memimpin langsung delegasi Aceh pada acara Global Specialty Coffee Expo (GSCE) 2018, selain mempromosikan Kopi Gayo Aceh yang sudah mendunia dengan segala cita rasa yang unik, juga memperkenalkan para investor berbagai peluang investasi di Aceh melalui sebuah forum yang dikemas khusus oleh KBRI Washington DC Indonesia - USA Business Forum: Aceh Investment Opportunities,” ungkap Irwandi Yusuf.

Irwandi menambahkan, GSCE menjadi salah satu expo kopi internasional yang sangat strategis, tidak hanya memperkenalkan kopi Arabika Aceh dengan segala keunggulannya, tapi juga peserta expo dapat merasakan kenikmatan kopi Arabika Aceh yang diracik khusus oleh Barista Aceh di stand kopi Aceh menggunakan cup kopi dengan branding wisata Aceh “The Light of Aceh”.

“Masyarakat dan Pemerintah Aceh, khususnya pelaku industri kopi Aceh patut berbangga karena kopi Aceh dengan branding “Green Mountain Organic Kopi, Aceh - Sumatera” sudah beredar luas di beberapa pusat perbelanjaan (Mall) besar di Amerika. Hal ini menjadi indikator bahwa kopi Aceh sudah dikenal dan disukai masyarakat global. Kita harus maksimalkan produk kopi Gayo Aceh di pasar global dengan selalu menjaga kualitasnya,” ungkap gubernur. (msm)

## Peluang Investasi dan Promosi Pariwisata

**K**EPALA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Ir. Iskandar M.Sc menambahkan, acara GSCE 2018 menjadi momen penting untuk menyampaikan pesan kekinian tentang peluang investasi Aceh dengan segala kemudahannya.

Peluang dan kemudahan investasi di Aceh yang dipaparkan oleh Gubernur Aceh pada forum bisnis, tidak hanya membangun hubungan “connecting people” antara masyarakat Negara Bagian Washington dengan masyarakat Aceh, tapi juga mensosialisasikan berbagai insentif yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada calon investor, seperti adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Aceh dan Lembaga Luar Negeri dan Perppu No. 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Arun - Lhokseumawe. “Semua produk hukum tersebut memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan investasi di Aceh,” sebut Iskandar dengan optimis.

Kemudahan investasi yang juga industri pariwisata juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini juga diungkapkan oleh Plt Kadisbudpar Aceh Amiruddin M.Si

Ia berharap peserta GSCE 2018 dapat juga memperoleh informasi tentang perkembangan industri pariwisata Aceh pasca tsunami Desember 2004 silam.

“Kita berharap peserta GSCE 2018 yang hadir tidak saja melihat peluang investasi, tapi juga bisa memperoleh banyak informasi tentang perkembangan industri pariwisata Aceh pasca-tsunami, khususnya ragam pesona alam dan budaya Aceh serta berbagai atraksi wisata yang ada di ujung Pulau Sumatera,” sebutnya didampingi Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh Rahmadhani.

Semua atraksi yang ada saat ini, sebut Amiruddin telah dipersiapkan dan dikemas melalui Calendar of Event (CoE) Aceh

2018, dimana nantinya akan memudahkan bagi wisatawan mancanegara berkunjung ke Aceh dan menarik minat calon wisman untuk melihat sejumlah

even yang bertaraf internasional seperti Aceh International Marathon, Sabang Marine Festival, Aceh Freediving, Aceh Rafting dan Surfing Championship, Gayo Alas Mountain International Festival, dan lainnya yang digelar sepanjang tahun 2018.

“Keikutsertaan Aceh pada berbagai expo internasional adalah untuk menyampaikan pesan bahwa industri pariwisata Aceh

semakin berkembang dan layak dikunjungi wisatawan dengan ragam pesona wisatanya, sekaligus membangun branding image tentang Aceh sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman dan menawan yang disajikan melalui penayangan TVC The Light of Aceh, bahan-bahan promosi, paket wisata dan cenderamata selama acara GSCE berlangsung,” sebut Amiruddin. (msm)



# Dinas Kominfo Kawal Aceh SIAT



**Marwan Nusuf, B.HSc MA**  
Kadis Kominfo  
dan Persandian Aceh

Prosedurnya, sebelum aplikasi itu dipublish, harus dilakukan uji keamanan terlebih dahulu. Ada celah keamanan nggak, kalau tidak ada celah keamanan, baru kita publikasi. Nah, kita sudah memenuhi tahapan itu."

**S**ALAH satu program unggulan Pemerintah Aceh pimpinan drh H Irwandi Yusuf (Gubernur) dan Ir H Nova Iriansyah (Wakil Gubernur), adalah Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu). Target utama dari program ini adalah pengembangan sistem informasi dan database yang terpadu ke semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Aceh menginginkan terwujudnya data

yang terintegrasi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan.

Saat ini, misi Pemerintah Aceh menyangkut data yang valid dan bisa digunakan untuk semua kepentingan masyarakat dan lintas instansi sebagian telah terwujud bila dilihat secara lebih mendalam, program Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) adalah sebuah terobosan lanjutan yang memang telah digagas oleh Gubernur Irwandi Yusuf, semasa menjabat sebagai Gubernur Aceh, pada periode 2007-2012 lalu. Kini saat kembali memimpin Aceh, Gubernur Irwandi kembali menggelindingkan 15 program unggulan, yang salah satunya adalah SIAT.

Sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 14 tahun 2016, peran yang sangat vital disandang oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dalam tataran lalu lintas informasi digital, termasuk di Aceh tentunya. Peran itu antara lain, sebagai penyedia infrastruktur data center, pengelola sub domain, kalau di Aceh domainnya adalah acehprov.co.id.

Menurut Marwan Nusuf, dalam kaitan terwujudnya data yang terintegrasi seperti dalam program SIAT, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfo) Aceh menyediakan berbagai infrastruktur untuk melayani seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh, terutama di RSUDZA. "Pertama, kita menyediakan akses VPN IP untuk kebutuhan komunikasi data antara RSUDZA, RSIA, dan RSJ ke data warehouse Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Adapun kapasitas lebar pita (*bandwidth*) yang disediakan untuk masing-masing rumah sakit sebesar 521 Kbps," kata Marwan Nusuf dalam sebuah

wawancara dengan kru Tabloid RSUDZA Lam Haba, pekan lalu.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan akses Metro-e kepada RSUDZA, RSIA, dan RSJ untuk kebutuhan komunikasi data dalam rangka penerapan *E-government* Pemerintah Aceh.

Adapun kapasitas lebar pita (*bandwidth*) yang disediakan untuk masing-masing rumah sakit sebesar 5 Mbps.

Selain itu juga ada penyediaan *Hosting Server* untuk sistem pendaftaran online pasien pada RSUDZA.

Sementara koneksi VPN adalah komunikasi data yang disiapkan untuk kebutuhan koneksi dari rumah sakit ke server data warehouse kependudukan yang ada di Jakarta, dalam hal ini Dirjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan Metro-e juga jaringan komunikasi data, tapi berbeda layanan dibandingkan dengan VPN IP. Nama produknya

berbeda, meskipun punya tujuan yang sama. Sedangkan mekanisme kerjanya, Metro-e disiapkan untuk semua SKPA, sejak empat tahun yang lalu. "Misalnya saja, email, website, LPSE, aplikasi keuangan," kata Marwan Nusuf.

Dipaparkan, pihak Dinas Kominfo Aceh hanya menyiapkan infrastruktur jaringan komunikasi data. Penggunaannya untuk apa saja, tergantung para user-nya. "VPN IP itu persiapannya sebelum penandatanganan beberapa pekan lalu. Seminggu sebelum launching sudah disiapkan. Sedangkan Metro-e sudah lama kita siapkan, sejak empat tahun lalu," tandas Marwan.

Di RSUDZA, kalau link metro putus, pendaftaran pasien online menjadi terkendala.

Terkait *hosting server* merupakan aplikasi registrasi online yang diletakkan di hosting pemerintah Aceh yang dikelola

la Dinas Kominfo. Aplikasinya diletakkan di server, sehingga bisa diakses oleh publik. "Kalau yang hosting, yang punya baru RSUDZA. Yang lain kan belum ada. Servernya ada di data server pemerintah Aceh, sedangkan database ada di rumah sakit," kata Kadis Kominfo.

Dengan dukungan berbagai infrastruktur IT itu, pelayanan di rumah sakit menjadi lancar. Sebelum beragam aplikasi tersebut diterapkan, pihak Kominfo sudah menguji keandalan terlebih dahulu, agar tidak di-*hack* atau diganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "Prosedurnya, sebelum aplikasi itu dipublish, harus dilakukan uji keamanan terlebih dahulu. Ada celah keamanan nggak, kalau tidak ada celah keamanan, baru kita publikasi. Nah, kita sudah memenuhi tahapan itu," tandas Marwan Nusuf. (\*)



## Guard Keamanan Informasi SKPA

**D**ALAM dunia e-digital Pemerintah Aceh, Kominfo berperan sebagai *guard* keamanan informasi di setiap SKPA. Dalam hal ini seperti melakukan proteksi serta penanggulangan virus pada fasilitas jaringan internet di SKPA. Termasuk dari kemungkinan serangan *hacker*. "Intinya, kita memberikan perlindungan hanya terhadap fasilitas IT milik pemerintah dalam hal ini Pemerintah Aceh, baik itu di pusat propinsi maupun yang tersebar di kabupaten/kota," ujar Marwan Nusuf.

Dalam menjalankan multi peran di dunia digital, pihak Diskominfo Aceh memiliki SDM yang mumpuni untuk mengelola sekaligus mengoperasikan fasilitas IT milik Pemerintah Aceh. Dengan tugas pokok sebagai penyedia sistem komunikasi internal, baik di tataran SKPA

dan pengelola data informasi, terutama dalam hal sosialisasi kegiatan pemerintahan untuk diketahui rakyat.

Dalam kaitan peran sebagai integrator lalu lintas informasi, termasuk dalam program SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), selain sebagai penyedia jaringan, Diskominfo punya satu target khusus yaitu punya data yang diseragamkan dengan aplikasinya. "Dengan konsep seperti itu, nantinya bisa dilakukan integrasi data. Sedangkan penyedia data adalah instansi terkait, misalnya data pertanian dari SKPA terkait pertanian. Tupoksi Kominfo sebagai pengelola, bukan penyedia data sesuai Pergub," tutur Marwan Nusuf.

Sebagai juru bicara pemerintah daerah, atau *government chief officer* atau *government public relations*, Kominfo

membina hubungan lintas *stake holder*, menganalisa keadaan, serta juga menyajikan informasi dengan sumbernya dari website setiap SKPA.

Kadiskominfo sendiri berperan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Sedangkan di tataran SKPA namanya adalah, PPID pembantu. Sementara PPID utama di kabupaten kota adalah Kadiskominfo setempat.

Pada sisi lain, untuk terwujudnya informasi yang *update* serta bisa diakses secara *real time*, dan tentu saja siap saji bagi terhadap permintaan semua *stake holder*, setiap SKPA harus menyediakan informasi secara berkala, termasuk dalam hal potensi dinas atau badan masing masing.

Menurut Marwan Nusuf, untuk kelancaran peran sebagai integrator dalam lalu lintas informasi secara digi-

nuh, termasuk informasi yang *real time*," ujar Marwan Nusuf yang juga mantan Kepala DRKA tersebut.

Menyangkut program SIAT, karena sifatnya terpadu, dituntut sinergitas dan integrasi yang utuh tentang informasi daerah. Dalam hal ini bukan hanya sekadar data kependudukan, namun juga menyangkut pendapatan daerah, pajak hingga potensi investasi. (\*)

### Dukungan Kominfo Terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan

- ✓ Penyediaan akses VPN IP untuk kebutuhan komunikasi data antara RSUDZA, RSIA, dan RSJ ke dataware house Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Adapun kapasitas lebar pita (*bandwidth*) yang disediakan untuk masing-masing rumah sakit sebesar 512 Kbps.
- ✓ Penyediaan akses Metro-e kepada RSUDZA, RSIA, dan RSJ untuk kebutuhan komunikasi data dalam rangka penerapan e-government Pemerintah Aceh. Adapun kapasitas lebar pita (*bandwidth*) yang disediakan untuk masing-masing rumah sakit sebesar 5 Mbps.
- ✓ Penyediaan *Hosting Server* untuk sistem pendaftaran online pasien pada RSUDZA.

# SIAT Mempermudah Integrasi Data Kependudukan

Jadi ada sekitar 18 elemen data dapat digunakan, mulai dari nama, alamat, sampai kepada golongan darah. Dari RS ada data balikan yang masuk ke server Kemendagri, data itu nantinya akan diteruskan kembali kepada DRKA."

**Drs. Umar Dhani, M.Si**  
Kadis DRKA



diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tatacara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dijelaskan, hak akses data kependudukan yang tersimpan di server Kemendagri, baru bisa diperoleh setelah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kemendagri. Tujuannya, adalah untuk mengamankan data kependudukan

dari risiko penyalahgunaan.

Karenanya, ada standar keamanan yang diatur, seperti harus pakai Virtual Private Network (VPN). Dan itu sudah disiapkan oleh manajemen rumah sakit dengan dukungan DRKA dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. "Ini semacam terowongan khusus. Tidak bisa menggunakan jaringan pada umumnya," ujar Kadis DRKA.

Dari kerjasama itu, ada sejumlah data yang didapat Kemendagri dari RS, seperti nomor

rekam medis, akan diketahui pasien sudah berapa kali berobat. Status kelahiran anak dan kematian juga akan masuk ke Dirjen Dukcapil. Semua itu, nantinya akan diteruskan kembali kepada Pemerintah Aceh melalui DRKA.

Terkait dengan sistem, butuh proses untuk dibangun. "Membangun sistem aplikasi itu tidak seperti membeli nasi bungkus. Orangnya harus terlatih, sistemnya dan alat harus optimal, begitu juga dengan keamanannya," sebutnya. **(sli)**

**P**EMANFAATAN Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) untuk pelayanan kesehatan masyarakat saat mulai diimplementasikan oleh tiga rumah sakit milik Pemerintah Aceh.

Ketiga institusi pelayanan kesehatan tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA), Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh.

Namun baru RSUDZA secara resmi meluncurkan integrasi Data Kependudukan dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Peluncuran program ini dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT pada 2 April 2018 lalu.

Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) Drs Umar Dhani M.Si, mengatakan, akses data kependudukan oleh rumah sakit milik Pemerintah Aceh, didapat setelah ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Gubernur Aceh dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kement

rian Dalam Negeri (Kemendagri).

Perjanjian kerjasama Nomor:119/16358/DUKCAPIL/ Nomor:21/PKS/2017 tentang pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-E untuk pelayanan kesehatan masyarakat ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH M.H dan Gubernur Aceh drh. Irwandi Yusuf M.Sc.

Dari perjanjian kerja sama itu, kemudian Gubernur Aceh menetapkan keputusan Gubernur Aceh, menunjuk tiga rumah sakit. Ada petunjuk teknis yang harus diikuti, seperti elemen data apa saja bisa diambil dan dimanfaatkan oleh rumah sakit. "Jadi ada sekitar 18 elemen data dapat digunakan, mulai dari nama, alamat, sampai kepada golongan darah. Dari RS ada data balikan yang masuk ke server Kemendagri, data itu nantinya akan diteruskan kembali kepada DRKA," kata Kadis DRKA.

Umar Dhani meminta masyarakat tidak perlu khawatir datanya di salah gunakan, karena pemanfaatannya sudah

## Registrasi Pasien Cukup Satu Menit

**TAK** dapat dibantah lagi, banyak manfaat yang didapat dengan adanya pemanfaatan data kependudukan dalam bidang kesehatan, seperti memudahkan dan mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kalau sebelumnya butuh waktu lima sampai enam menit, dengan pemanfaatan NIK, maka proses pendaftaran atau registrasi pasien cukup satu menit saja. "Cukup ketik NIK, semua data pasien akan muncul tidak perlu entry data lagi secara manual dan bisa langsung bridging ke BPJS," terangnya.

Bukan hanya itu, kekhilafan data juga dapat dihindari bahkan bisa terwujud zero kesalahan. Dengan mengetik NIK, maka akan muncul data lengkap pasien, tidak ada lagi kesalahan pengetikan nama, alamat bahkan tempat dan tanggal

lahir.

Kerja operator juga semakin mudah, tidak perlu lagi input data secara manual. Berapapun jumlah pasien tentu akan sanggup dilayani. Beda kalau secara manual, baru 10 pasien saja, mata sudah terasa lelah, apalagi sampai harus menangani seribuan lebih pasien setiap harinya. "Kalau dengan NIK, sudah agak ringan, tinggal ketik NIK akan muncul nama, alamat, dan data lainnya. Tingkat kesalahan tidak ada," terangnya.

Untuk itulah, Kadis DRKA mengimbau masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk segera mendatangi kantor Disdukcapil setempat. Karena ini juga bagian untuk lancarnya pelayanan terintegrasi.

Tantangan sekarang paling berat, kata Umar Dhani, adalah masih ada

masyarakat tidak mau melakukan perekaman. Namun sewaktu merasa butuk, baru mengurusnya dengan tergesa-gesa. Bahkan sampai menuding petugas memperlambat.

Padahal semua itu, tergantung sistem, kalau jaringan lancar, maka prosesnya bisa cepat, karena data yang diterima Ditjen Dukcapil adalah dari seluruh Indonesia.

Umar Dhani berharap, tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib Adminduk terus meningkat, karena data kependudukan dan catatan sipil bagi seorang warga negara sangatlah penting. Karena, selain sebagai identitas lengkap, tertib adminduk juga sangat dibutuhkan untuk mengurus berbagai kebutuhan penduduk, salah satunya untuk dapat mengakses layanan kesehatan. **(sli)**

## Penyederhanaan Layanan Kesehatan

RSUDZA adalah rumah sakit pertama yang diuji coba, sementara beberapa rumah sakit lainnya, juga sedang mengarah ke sana.

Sudah kita rencanakan teken MoU, draft sudah semua, hanya tinggal tandatangan dengan bupati dan walikota masing-masing."

**dr. Hanif**  
Kadis Kesehatan Aceh



**P**EMERINTAH Aceh mulai mewujudkan pelayanan kesehatan cepat dan mudah lewat proses registrasi pasien melalui integrasi data kependudukan.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, mengatakan, penggunaan Integrasi Data Kependudukan dengan Sistem Informasi Manaje-

men Rumah Sakit (SIMRS) di RSUDZA, adalah upaya penyederhanaan layanan bidang kesehatan bagi masyarakat Aceh. "RSUDZA adalah rumah sakit pertama yang diuji coba, sementara beberapa rumah sakit lainnya, juga sedang mengarah ke sana. Sudah kita rencanakan teken MoU, draft sudah

semua, hanya tinggal tandatangan dengan bupati dan walikota masing-masing," kata dr Hanif.

Kadis Kesehatan Aceh itu sangat berharap agar semua rumah sakit di Provinsi Aceh, dapat mengikuti langkah RSUDZA. Namun tentunya, sebelum program penyederhanaan layanan kesehatan diberlakukan di RS milik Pemerintah Kabupaten/kota, ada baiknya melakukan studi banding ke RSUDZA untuk melihat bagaimana proses yang sudah berjalan di RS Zainal Abidin. "Penyederhanaan layanan administrasi pelayanan kita harapkan dapat mempersingkat proses pendaftaran dan antrian pasien, baik pasien umum dan JKA," kata dr Hanif.

Kadis Kesehatan berharap, dengan adanya

integrasi data kependudukan dengan SIMRS di RSUDZA, maka di saat ada pasien datang berobat tidak perlu lagi direpotkan untuk antri mendaftar.

Calon pasien tinggal datang, berikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor kepesertaan BPJS, maka akan langsung mendapatkan layanan. Otomatis tidak perlu lagi menulis status pasien rawat jalan atau pasien rawat inap, karena akan langsung muncul dalam sistem.

Kalau pasien masih dibebankan untuk mengisi formulir, maka butuh waktu lama atau lebih 10 menit di loket pendaftaran, untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Untuk itulah, Kadis Kesehatan sangat berharap agar sistem yang sudah

diterapkan tersebut dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan.

"Kita harap sistem ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat dan berkelanjutan, jangan nanti sebentar digunakan setelah itu hilang. Kalau perlu peralatan tambahan dan penunjang harus diusahakan," ujarnya.

Di sisi lain, Kadinkes Aceh itu berharap agar manajemen RSUDZA dapat terus berinovasi menciptakan berbagai terobosan dalam rangka memudahkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Mungkin setelah registrasi online dan integrasi data kependudukan dengan SIMRS, bisa menerapkan aplikasi pendaftaran dengan pemindai sidik jari atau finger print. "Kalau perlu seperti model yang kini digunakan pada Bandara di Jakarta, keluar selebar kertas setelah melakukan perekaman sidik jari dan menjadi petunjuk saat mendaftar," ujar dr Hanif. **(sli)**

# Inovasi Teknologi Informasi Permudah Layanan RSUDZA



dr Fachrul Jamal, Sp An, KIC  
Rektor RSUDZA

**I**NOVASI teknologi informasi (IT) yang terus berkembang dewasa ini memberi dampak positif dalam berbagai aspek, termasuk dengan mempermudah dan mempercepat layanan di Rumah Sakit.

Sebut Saja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh yang saat ini sudah menggunakan data terintegrasi dalam mempermudah layanan kepada pasien, sehingga pasien tidak perlu berlama-lama untuk antri menunggu pasien lainnya untuk entri data.

Keluarga pasien cukup memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, semua data pasien akan langsung terlihat dan dapat diakses oleh petugas pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

"Sistem integrasi data kependudukan menjadi solusi memangkas antrian dan mempercepat pelayanan saat pasien berobat di rumah sakit umum daerah Zainoel Abidin," kata Direktur RSUDZA, dr Fachrul Jamal, Sp An, KIC di ruang kerjanya.

Menurut dia dengan sistem tersebut setiap pasien kini

hanya perlu mengantri sekitar 1 hingga 2 menit saja, karena semua dapat dilakukan dengan data yang telah ada dalam sistem tersebut.

Ia mengatakan seluruh data pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin tersimpan dalam sistem informasi manajemen rumah sakit, sehingga para petugas khususnya tidak memerlukan waktu untuk membuka file-file secara manual.

"Selain mempersingkat waktu antrian, sistem ini juga akan memudahkan tenaga medical record saat mendaftarkan pasien," kata spesialis anastesi tersebut.

Ia mengatakan jika pun pasien kehilangan kartu berobat, mereka bisa mendaftar berobat hanya dengan kartu penduduk karena secara otomatis rekam medik akan muncul dengan sendirinya.

Orang nomor satu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin tersebut mengatakan SIMRS yang dilakukan dalam manajemen rumah sakit tersebut bekerja sama dengan Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh sebagai penyedia data dan Dinas Informasi dan Persandian Aceh sebagai pihak yang menyiapkan sarana penunjang dalam menyelesaikan program integrasi data kependudukan tersebut.

Ketersediaan infrastruktur jaringan yang telah disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh memudahkan berbagai program integrasi data yang langsung terhubung dengan server data di Jakarta.

"Setiap hari RSUDZA dapat mengakses sebanyak 2.500 data penduduk yang telah terhubung dalam sistem tersebut dan saat ini jumlah pasien yang berobat setiap harinya 1.000 lebih," katanya.

Menurut dia inovasi yang dikembangkan dan kini diter-

apkan di RSUDZA merupakan wujud dan komitmen dari manajemen dan juga salah satu program unggulan dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melalui program Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT).

Ia mengatakan sebagai satu-satunya Rumah Sakit Rujukan Utama di Provinsi Aceh, manajemen dan seluruh staf di rumah sakit milik Pemerintah Aceh tersebut berusaha untuk memberikan pelayanan paripurna kepada pasien yang menggunakan fasilitas di rumah sakit tersebut.

Pihaknya terus melakukan berbagai terobosan dan juga inovasi agar rumah sakit tersebut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien di seluruh kabupaten/kota yang dirujuk ke rumah sakit tersebut.

"Kita terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi-inovasi yang menjadikan RSUDZA semakin maju dengan penggunaan layanan berbasis teknologi salah satunya pendaftaran online dan juga pemanfaatan data secara terintegrasi,"

katanya.

Menurut dia inovasi yang dilakukan tersebut tak lain dan tak bukan semata-mata hanya memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat di Tanah Rencong serta meminimalisir keluhan pasien dalam mendapat pelayanan kesehatan.

Pihaknya sangat menyadari kepuasan, kenyamanan dan keamanan bagi pasien merupakan hal utama yang sangat di kedepankan oleh seluruh staf di lingkungan RSUDZA dalam memberikan dan melakukan tindakan medis kepada setiap pasien.

Tentu manajemen juga tidak pernah menutup mata terhadap berbagai masukan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan, karena berbagai masukan tersebut merupakan wujud dan bukti masyarakat cinta dan ingin pelayanan kesehatan yang ada menjadi yang terbaik.

Ia mengatakan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada RS Zainoel Abidin tersebut digunakan secara resmi setelah resmi diluncurkan oleh Wakil Gu-

bernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT pada Senin (2/4) di rumah sakit tersebut.

Orang nomor dua di provinsi ujung paling barat Indonesia itu saat meresmikan penggunaan SIMRS tersebut juga ikut memberikan apresiasi terhadap proses registrasi pasien melalui data kependudukan. Inovasi tersebut merupakan bagian peningkatan layanan yang menjadi hak dari setiap pasien dan merupakan etos kerja serta kinerja pihak rumah sakit yang luar biasa.

Dengan segudang perubahan dan inovasi yang telah dilakukan tersebut, manajemen RSUDZA terus berupaya dan memaksimalkan seluruh tenaga dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan rumah sakit tersebut untuk bersama-sama memajukan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Tanah Rencong.

Pelayanan prima dan paripurna serta penanganan secara cepat terhadap dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pasien, itulah keinginan Manajemen RSUDZA. (mif)



## Semua Mendukung Rumah Sakit

**D**INAS Kesehatan selaku stake holder atau pemangku kepentingan bidang kesehatan, tentunya tidak melakukan pelayanan secara langsung. Karena yang melakukan itu adalah Rumah Sakit hingga level Puskesmas Pembantu sekalipun.

Karena itu, sudah seharusnya, program-program Puskesmas dan Rumah Sakit didukung oleh semua pihak. Dalam kaitan itu, ada sinergitas antara dinas kesehatan dengan rumah sakit. Sehingga jika ada yang menjadi kendala, bisa dibantu dalam kesempatan pertama.

Begitu juga jika ada ide baru akan didukung, kare-

na ujung-ujungnya adalah terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan. Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di provinsi Aceh, setiap harinya RSUDZA melayani seribuan lebih pasien rujukan dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Mengingat begitu banyak pasien yang dilayani, maka komplain dari masyarakat tentu tidak dapat dihindari. Karena rasanya tidak mungkin zero complain. "Hotel bintang lima saja yang sedemikian bagus, pasti ada komplain dari pelanggan, apalagi rumah sakit selaku pemberi layanan publik. Cukup banyak melayani pasien, seribuan dalam satu hari. Wajar kalau ada satu

dua complain," kata dr Hanif.

Untuk itulah, dirinya berpesan kepada masyarakat tidak perlu semua harus datang ke RSUDZA. Kalau memang keluhan ringan, cukup maksimalkan pelayanan di Puskesmas atau rumah sakit di kabupaten/kota. "Kalau yang di Banda Aceh bisa di Meuraxa, kalau di Sigli bisa di RSUD Sigli. Jadi tidak perlu semua harus ke RSUD Zainal Abidin," kata dr Hanif.

Ia melanjutkan, RSUDZA merupakan pusat rujukan tertinggi di Aceh. Orang yang datang berobat memang yang sudah tidak mampu lagi ditangani di rumah sakit lain, karena minim sumber

daya manusia (SDM) atau alat penunjang.

Tapi sepanjang, tenaga medis atau dokter spesialis ada, perawatan diberikan sangat memadai, maka silakan berobat di rumah sakit daerah.

Bila semua diarahkan berobat ke Banda Aceh, maka Rumah Sakit Zainal Abidin akan kewalahan melayani banyaknya pasien, terutama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan poliklinik akan selalu ramai.

Kalau jumlah pasien terlalu ramai, dirinya tidak yakin lagi kualitas pelayanan diterima masyarakat akan maksimal, karena semua serba

kesulitan. "Terlalu ramai akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kalau mau kualitas baik, maka pasien jangan terlalu banyak. Terlalu banyak itu berpengaruh, seharusnya seorang dokter bisa menangani atau merawat pasien lebih lama, maka dengan waktu terbatas tidak akan memadai.

Apalagi mengingat antrian di belakangnya cukup panjang atau bisa sampai 200 orang. Kalau konsultasi lama, maka kapan pasien di belakangnya bisa mendapatkan giliran.

Dr Hanif menegaskan bahwa dirinya tidak melarang pasien datang berobat ke RSUDZA. Namun, kalau keluhan ringan masih dapat ditangani di rumah sakit tipe C atau tipe B, maka tidak perlu sampai dirujuk ke tipe A. (sli)

# Menggandeng Blogger, Melawan Hoaks

**Y**ELLY begitu semangat tampil di depan telepon pintarnya. Ia tampak sedang merekam sebuah video. Dengan gaya seperti seorang presenter, Yelly menjelaskan sekilas tentang potensi Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya video berdurasi 59 detik itu siap diunggah di Youtube.

Apa yang dilakukan Yelly adalah satu dari beberapa kegiatan Flash Vlogging yang mengikutsertakan 76 penulis blog atau blogger Aceh. Beruntungnya, video anggota komunitas blogger Gam Inong Aceh ini, terpilih menjadi salah satu karya terbaik pada acara itu. Bersama para peserta lainnya, Yelly mendapat pelatihan langsung dari youtuber nasional Rio Ardhillah.

Pelatihan Flash Vlogging dengan tema Menuju Indonesia Maju ini diselenggarakan Kementerian Informatika dan Komunikasi Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (12/4/2018).

Flash Vlogging atau yang lebih dikenal dengan video blog dalam beberapa tahun terakhir mulai ngetren di kalangan para youtuber. Sebuah video blog yang paling fenomenal sempat diunggah Presiden Jokowi saat bertemu Raja Salman pada awal 2017 lalu.

Jokowi mengunggah vlog (video blog) pendek di akun Facebook-nya saat sesi makan bersama Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud yang tengah berkunjung ke Indonesia bersama anggota kerajaannya.

Dalam vlog tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan tentang kunjungan Raja Salman yang merupakan kunjungan balasan setelah Jokowi berkunjung ke Arab Saudi pada 2015 yang lalu.

Medium vlog kini menjadi metode baru bagi Presiden Jokowi untuk berkomunikasi, setelah jejaring sosial Twitter dan Facebook. Putra Jokowi, Kaesang Pangarep juga dikenal aktif mengunggah vlog melalui medium YouTube.

Begitu besarnya peran dari media vlog ini membuat Kementerian Informasi dan Komunikasi gencar mengampanyekan penggunaan vlog di kalangan para blogger. Kali ini, Aceh menjadi salah satu wilayah yang disasar Keminfo-kom dalam mengenalkan media vlog kepada para generasi muda. Terutama mereka yang

saat ini aktif menulis di platform blog atau para youtuber.

Melalui vlog setidaknya pemerintah mengharapkan ide-ide kreatif dan inovatif tentang berbagai potensi alam dan keanekaragaman hayati dan budaya Indonesia dapat dikenal luas di dunia.

Direktur Kemitraan Komunikasi Deded Surya Nandika diwakili oleh Kasubdit Kemitraan Media Sukatmi dalam sambutan saat membuka acara mengatakan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika diamanatkan untuk mengkoordinasikan isu sektor menjadi isu tunggal untuk kemudian disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat melalui simpul komunikasi yang sudah terbangun, termasuk dengan komunitas Vlogger/blogger.

Menurutnya, tujuan menyelenggarakan kegiatan itu untuk mensosialisasikan capaian pembangunan pemerintah, dimana saat ini pemerintah telah banyak melakukan pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik seperti pembangunan infrastruktur, telekomunikasi, pembangunan bidang sosial, ekonomi sebagai modal masa depan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memberi dampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan, baik dampak positifnya seperti kemudahan dalam mengakses berbagai informasi tanpa batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu membanjirnya informasi yang tidak bisa dibendung telah mempengaruhi pola pikir dalam kehidupan manusia.

“Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memilih dan memilah informasi yang positif yang bukan hoax, informasi yang benar yang memberikan manfaat,” ujarnya. Ia menjelaskan, informasi/berita Hoaks yang disampaikan melalui media sosial telah mewabah dimana-mana. Ada yang memproduksi dan menyebarkan.

Pertumbuhan media sosial di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan pengetahuan dan kesadaran bermedia sosial yang bijak. Hasilnya, media sosial dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai wadah penyebaran konten negatif berupa hoax, ujaran kebencian, fake news dan radikalisme. Upaya menekan penyebaran konten negatif, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan



Informatika telah melakukan pemblokiran. “Namun, sapu bersih konten negatif mustahil dilakukan jika tidak disertai dengan kesadaran setiap individu pengguna media,” ungkap Sukatmi.

Sementara itu Kadis Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusef dalam sambutannya mengatakan Flash Vlogging merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video yang kontennya dapat diunggah dengan cepat.

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang dilengkapi dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk melakukan aktivitas blog video.

Menurutnya dunia sekarang sangat berbeda dengan dulu. “Kita tidak pernah membayangkan surat kabar ternama tutup gara-gara media internet. Artinya orang tidak membawa lagi hardcopy hanya bisa mengakses melalui smartphone saja,” jelasnya.

Menyangkut keamanan website, Marwan menjelaskan IT di Indonesia tidak kalah dengan IT yang ada di antero dunia. “Hal ini bisa dilihat di website Pemerintah Aceh sudah diserang lebih dari 33 juta kali dan namun sampai sekarang belum bisa tembus,” ungkapnya.

Lebih lanjut Marwan mengatakan, dalam Islam ada yang namanya muamalah, kalau dikaitkan dalam internet, maka tidak bisa dilepas dari

anjaran dalam Islam.

“Sebagaimana kata Rasulullah, apabila kamu melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, apabila tidak sanggup dengan tanganmu maka cegahlah dengan lidahmu, apa bila tidak sanggup dengan lidahmu, maka cegahlah dengan hatimu yang demikian itu adalah orang yang sangat lemah imannya,” jelas Marwan.

“Orang IT menggunakan vlogger melalui tangan dan lisan untuk hal yang positif sebagai bagian untuk mencegah kemungkaran. Bila kita lihat dengan hadis tersebut, orang IT adalah kelompok yang disebut oleh Rasulullah,” katanya.

Marwan juga berharap para vlogger untuk membantu Pemerintah Aceh menyosialisasikan Pekan Kebudayaan Aceh pada Agustus mendatang dengan mencerahkan edukasi bagi masyarakat luas sehingga meningkatkan perekonomian Aceh.

Kegiatan Flash Vlogging tersebut juga menghadirkan youtuber terkenal Rio Ardhillah. Dalam pemaparannya Rio mengungkapkan setiap warga dapat menuangkan hasil pikiran dalam bentuk video dengan menyebarkan pesan-pesan positif di tengah banyaknya berita hoax yang beredar saat ini.

Menurutnya membuat video blog pada dasarnya sangat mudah. Tidak perlu berdurasi panjang, tapi cukup memberi penjelasan tentang objek yang direkam.

“Hal yang paling penting dari sebuah video blog adalah seberapa besar video tersebut

dapat menarik perhatian penontonnya, minimal penonton sudah tertarik dengan konten video tersebut pada 15 detik pertama,” ujarnya.

Menurut Rio sebetulnya banyak objek yang dapat dijadikan ide membuat sebuah video blog. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, adat dan budaya termasuk pariwisata, adalah sumber ide yang tidak akan pernah habis untuk digali.

“Buatlah video yang sederhana, tapi kreatif dan menarik,” ujarnya. Tips membuat video blog yang cepat dan singkat ini ternyata menyedot perhatian besar 76 peserta dari komunitas blogger Aceh.

Seperti diungkapkan Muhazir, peserta dari Komunitas Kanet Bu. Menurutnya materi Flash Vlogging telah membuka wawasan baru baginya untuk menuangkan ide-ide kreatif dalam bentuk video blog.

Sebagai seorang blogger Muhazir juga berharap dapat ikut serta dalam mengantisipasi penyebaran hoaks yang selama ini gencar dilancarkan pihak tertentu untuk menyudutkan pemerintah. Hal yang sama juga diungkapkan Cut Rahmawati.

“Saya akan mencoba menerapkan materi yang saya peroleh ini untuk mensosialisasikan tentang ilmu parenting dan pendidikan anak,” sebutnya. Hampir semua para peserta juga mengungkapkan agar ke depan pemerintah diharapkan dapat merangkul dan mengoptimalkan peran para blogger untuk terlibat aktif dan pembangunan daerah.(as)

# Gubernur Dukung KPK Wujudkan Pemerintahan Aceh yang Bersih

**G**UBERNUR Irwandi Yusuf menegaskan, Pemerintahan Aceh, akan terus mendukung langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi ini, sebab hanya dengan upaya tersebut, akan dapat terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkualitas di Aceh.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam pertemuan bersama Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan Koordinator Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda, perwakilan Kamar Dagang dan Industri serta para pelaku usaha di Ruang Potensi Daerah, Komplek Kantor Gubernur Aceh, Jumat (27/04/2018).

Irwandi menjelaskan, korupsi kerap dikaitkan dengan sejumlah posisi strategis di lembaga pemerintah. Apalagi tren yang berkembang saat ini, kata Gubernur, sorotan untuk kasus korupsi lebih banyak mengarah kepada pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal itu terbukti dari banyak kasus korupsi yang terungkap, sebagian besar ter-



kait dengan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan penyelenggaraan negara.

Gubernur mengatakan, fakta-fakta tersebut mengandung tiga makna, pertama, bahwa tingkat korupsi di negeri kita masih cukup tinggi; Kedua, penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi perlu diperkuat; dan ketiga, langkah visioning, supervisi dan sosialisasi anti korupsi perlu terus ditingkatkan.

"Namun yang lebih penting dari ketiga hal itu adalah harus adanya niat dari semua pihak untuk tidak melakukan korupsi," ajak Gubernur.

Menurut Irwandi, meski sorotan kasus korupsi di negara ini banyak mengarah kepada peyelenggara negara, namun peranan kalangan swasta dan dunia usaha juga terlibat di dalamnya.

"Bahkan KPK menyebutkan, dari semua kasus korupsi yang mereka tangani, 80 persen di antaranya melibatkan sektor swasta," ujar Gubernur.

Modus yang dilakukan, antara lain, suap menyuap dan gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara.

Untuk itu, langkah supervisi untuk kasus korupsi di ka-

langan profesional dan swasta dinilai perlu ditingkatkan.

Gubernur berharap, kehadiran Komite Advokasi Daerah di Aceh bisa menjadi mediator dan fasilitator untuk memperkuat semangat ini. Nantinya Komite ini juga diharapkan dapat berperan dalam mensosialisasikan berbagai regulasi kebijakan anti korupsi, serta sebagai forum komunikasi untuk merumuskan solusi kongkrit pencegahan korupsi di daerah.

Dengan demikian, Komite ini akan dapat mendorong lahirnya profesional berintegritas, yang tidak hanya memiliki semangat anti korupsi, tapi juga berperan mencegah korupsi.

"Kami yakin, jika kita memiliki profesional berintegritas, maka langkah Pemerintah Aceh untuk mencapai visi 'Aceh yang damai dan sejahtera melalui Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani' tentu akan lebih mudah terwujud," ujar Gubernur.

Itu sebabnya Pemerintah Aceh sangat mendukung pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Aceh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga

gerakan anti korupsi di daerah ini semakin menguat.

Komite advokasi adalah forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha untuk dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala-kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang bersih dan berintegritas.

Komite ini juga diharapkan dapat mensosialisasikan berbagai regulasi kebijakan anti korupsi, serta sebagai forum komunikasi untuk merumuskan solusi kongkrit pencegahan korupsi di daerah.

Komite ini berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap empat permasalahan utama, yaitu prosedur perizinan investasi khusus yang cenderung lama, pengadaan barang dan jasa, kepastian hukum terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan iklim bisnis yang belum kondusif.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Aceh merupakan upaya "memperbaiki Jakarta yang dimulai dari daerah".

Saut Situmorang juga menjelaskan, pembentukan komite ini merupakan keberlanjutan dari komitmen bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan KPK dalam membangun integritas sektor swasta. (\*)

## SKPK Dihimbau Terbuka Informasi

**K**EPALA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf memberi imbauan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK), terbuka mengenai informasi publik.

Marwan juga memberikan masukan cara penyediaan dan pelayanan informasi publik yang sesuai aturan.

"Kalau tata kelola pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh diantaranya ada penyediaan data, penyimpanan, dan pendokumentasian data. Dalam hal ini semua adalah tanggung jawab dari Kominfo, dan penyediaan data yang ada wajib dilakukan oleh Kominfo," ungkap Marwan Nusuf saat memberikan sambutan kegiatan sosialisasi Penguatan Kelembagaan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bener Meriah, di Aula Setdakab Bener Meriah Rabu, (18/4/2018).

Tujuan lainnya, sebut Marwan, adalah untuk menjaga ketersediaan dan keterbukaan informasi bagi publik. Sementara informasi yang bersifat rahasia itu tidak boleh disebarluaskan kepada khalayak masyarakat, seperti dokumen khusus yang bisa mengganggu

kepentingan negara.

"Kenapa demikian, karena ini ditakutkan akan menimbulkan sesuatu masalah yang tidak diinginkan. Memberikan informasi kepada publik boleh saja jika mereka yang membutuhkan, terkecuali informasi yang rahasia tadinya. Contohnya seperti dokumen informasi tentang mutasi sebelum pelantikan, tidak boleh dipublikasikan," tandasnya.

Marwan menceritakan bahwa lima tahun terakhir, provinsi Aceh masih tetap bertahan di posisinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik, yaitu pernah nomor I, II dan terbaik III di seluruh Indonesia.

"Semoga PPID Aceh ke depan akan tetap menjadi terbaik di tahun 2018 ini. Kami yakin dan percaya bahwa SDM yang ada di Bener Meriah akan mampu dan terus update serta aktif untuk bisa menjadi yang terbaik di Aceh," jelasnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan,



Marwan Nusuf, B.HSc MA

pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap institusi pemerintahan wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah Irmansyah melaporkan dalam sambutannya,

terkait sosialisasi penguatan kelembagaan tersebut adalah implementasi dari undang-undang yang telah disahkan tentang keterbukaan publik.

"Dalam hal ini Kominfo Bener Meriah telah melakukan beberapa program yang telah dilakukan dalam beberapa bulan tahun 2018 ini, diantaranya telah melakukan pelatihan website se-SKPK, dan Kampung se-Bener Meriah, di gedung

Media Center," jelasnya.

Di waktu yang bersamaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Drs. Ismarisiska MM mengapresiasi atas dorongan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Bener Meriah.

"Karena hal ini sangat penting dan berguna untuk memudahkan Informasi bagi masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya. (\*)

# Studi ke Malaysia dan Jerman Kominfo Pelajari Aturan Hoaks dan Ujaran Kebencian

**K**EMENTERIAN Komunikasi dan Informatika mengirimkan tim khusus untuk mengkaji dan memastikan eksistensi penerapan aturan mengenai isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian, khususnya media sosial di dua negara, Malaysia dan Jerman.

Saat ini di Indonesia sedang menghadapi gelombang konten negatif. Sebagian konten negatif bermuatan politik muncul karena gelaran Pilkada tahun 2018 dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Kementerian Kominfo harus melakukan langkah-langkah pencegahan sesegera mungkin, memastikan bahwa semua teknologi digunakan untuk keperluan yang baik, bukan untuk kejahatan.

Tim Kominfo secara khusus ditugaskan Menteri Kominfo Rudiantara untuk memastikan strategi legislasi/regulasi kedua negara yang memungkinkan pemerintah mengatur isu berita

bohong, hoaks dan ujaran kebencian yang menyebar melalui platform media sosial, serta perlindungan data pribadi.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah melakukan komunikasi intensif semenjak pembahasan rancangan legislasi anti hoaks dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, termasuk parlemennya. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Kominfo dengan Pemerintah Jerman.

Negara jiran Malaysia telah menyusun perundangan mengenai penanganan isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Melalui pertemuan dengan beberapa pihak, Tim Kominfo akan memastikan isu dan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan penerapan aturan tentang isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Jerman telah menerapkan penegakan hu-

kum di media jejaring sosial pada tanggal 1 Januari 2018 dengan undang-undang yang dikenal sebagai NetzDG (Network Enforcement Law).

Pemberlakuan legislasi yang khusus berkaitan dengan penanganan konten negatif berupa ujaran kebencian atau hate speech itu salah satunya mengatur agar perusahaan layanan/platform media sosial wajib menghapus konten negatif dalam waktu 24 jam.

Bahkan ada ancaman denda bagi perusahaan media sosial yang kedapatan membiarkan ujaran kebencian tersebar. Kunjungan Tim Kominfo untuk mengidentifikasi konsekuensi dan dampak penerapan regulasi yang sudah berjalan selama empat bulan.

Tim yang dibentuk Kementerian Kominfo berasal dari gabungan para pemangku kepentingan yang dikoordinir oleh Kementerian Kominfo. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kerja tim adalah



mengidentifikasi beberapa poin krusial yang dapat diadaptasi agar bisa diterapkan di Indonesia, tentu dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, nilai luhur bangsa dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu juga, tim mengkaji mengenai cakupan ideal men-

genai batasan berita palsu, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial. Hal itu dibutuhkan agar regulasi dapat diterapkan proporsional serta tidak mengancam kemerdekaan berpendapat, kebebasan berekspresi dan demokrasi yang sudah berlangsung madani di Indonesia. (\*)

## Apresiasi Karya Kartini Zaman Now Menkominfo Ajak Gunakan Aplikasi Besutan Anak Negeri

**DALAM** peringatan Hari Kartini tahun ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengajak pengguna internet di Indonesia untuk menggunakan aplikasi buatan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kominfo melalui pesan video yang diputar dalam Soft Launching Aplikasi Messaging Callind di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (21/4/2018) pagi.

Dalam pesan video berdurasi 2 menit 32 detik itu Menteri Rudiantara mengajak rakyat Indonesia menggunakan aplikasi dalam negeri yang sudah mulai banyak bermunculan.

"Seperti yang hari ini diluncurkan aplikasi media sosial, mesenger, komersil yang disebut CallInd yang dikembangkan

oleh Mbak Novi dan timnya bertepatan dengan Hari Kartini," ungkapnya.

Menurut Menteri Kominfo, kehadiran aplikasi besutan anak negeri ini menunjukkan telah lahir kartini baru muda. "Kartini zaman now, yang tidak hanya bergelut dengan kesetaraan antara wanita atau pria atau gender. Tapi bisa memberikan nilai tambah bagi bangsa ini," tandasnya.

Sejak dirintis 2016, aplikasi bernama Callind karya Novi Wahyuningsih, gadis asal Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo, Kebumen, akhirnya resmi diluncurkan. Nuansa peringatan Hari Kartini tampak dengan sejumlah tamu undangan yang mengenakan kebaya.

Hadir pada kesempatan itu,

Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk yang juga ekonom asal Kebumen Hendri Saparini, Sekjen Kementerian Kominfo, Farida Dwi Cahyari mewakili Menteri Kominfo Rudiantara.

Founder Callind Novi Wahyuningsih menjelaskan, Callind yang merupakan singkatan dari Calling Indonesia adalah aplikasi chatting yang memungkinkan penggunaannya melakukan chat privat, broadcast message, kirim foto, telepon, hingga video call.

Aplikasi yang sudah dapat diunduh di toko aplikasi di Android yakni Play Store, kata Novi, sudah digunakan oleh sejumlah 350 ribu pengguna Android. "Ditargetkan 5 juta pada tahun 2018," katanya saat launching bersama Komisaris

Callind, Sohwat Hadi, Surahman dan Triyono.

Aplikasi ini CallInd dapat digunakan untuk menemukan sesama pengguna Callind dalam radius 100 km meski belum saling terhubung sebagai kontak.

"Semoga bisa benar-benar diterima di Indonesia dan bahkan merajai di negeri sendiri, selain itu bisa juga digunakan oleh masyarakat di dunia. Target 50 juta pengguna dalam 3 tahun semoga juga bisa tercapai," ujarnya.

Callind dapat menjadi sarana promosi dan pemasaran bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Aplikasi itu menggabungkan beragam platform, mulai aplikasi pesan pribadi, forum, komunitas, iklan dan jual beli produk.

"Kami sedang dalam proses pengembangan kerja sama dengan beberapa UMKM yang bergerak di sektor retail yang ada di daerah nasional harapan kami bisa kerja sama dengan UMKM di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Novi menegaskan bahwa sampai saat ini aplikasi Callind masih terus melakukan pembenahan dan perbaikan sistem serta pengenalan ke publik. Untuk itu dia berharap saran dan kritik dari masyarakat agar Callind bisa semakin baik.

"Kami menyediakan media komunikasi dengan harapan bisa bermanfaat dan menjadi raja di negeri sendiri," katanya. Sebagai pemilik aplikasi Novi berharap aplikasi chat Callind miliknya dapat diterima semua kalangan.

Sekjen Kementerian Kominfo, Farida Dwi Cahyari mewakili Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi hadirnya Callind yang mewarnai start up di Indonesia. Ada anak

muda di Indonesia apalagi perempuan yang mampu membuat aplikasi yang mampu bersaing di luar negeri. Kami berharap callind akan terus dikembangkan lagi, "harapnya.

### Ajak Gunakan Aplikasi Dalam Negeri

Saat ini di Indonesia lebih dari 140 juta orang yang memiliki akses terhadap internet. Hampir sebagian besar pengguna internet di Indonesia menggunakan aplikasi apakah dalam bentuk media sosial, messaging, chat dan aplikasi lain. "Banyak aplikasi yang digunakan pengguna internet, apakah itu media sosial, messaging. Mereka menggunakannya berjam-jam," kata Menteri Rudiantara.

Pola penggunaan seperti itu dinilai Menteri Kominfo tidak ada salahnya, namun ia lebih mengkritisi bahwa pengguna internet di Indonesia lebih banyak menggunakan aplikasi besutan perusahaan luar negeri.

"Tidak ada salahnya, namun kalau kita lihat semua menggunakan aplikasi perusahaan internasional, perusahaan asing. Padahal banyak aplikasi media sosial, messaging yang dikembangkan anak muda Indonesia," tuturnya.

Menteri Rudiantara mendorong agar pengembang aplikasi di Indonesia dapat menyesuaikan aplikasi. "Tidak bisa dimungkiri bahwa aplikasi internasional menimbulkan kesan yang mudah penggunaannya lebih user friendly, karenanya saya mengajak kepada siapapun yang mengembangkan aplikasi-aplikasi di Indonesia selalu meng-upgrade aplikasinya agar disesuaikan dengan kebutuhan pasar ini," jelasnya. (\*)



Novi Wahyuningsih



# PROGRAM **ACEH HEBAT** DALAM **APBA 2018**

**APBA 2018**  
(Rp 15.084.003.946.127)

Belanja Tidak Langsung  
(27,43%)  
(Rp 4.137.425.306.467)

Belanja Langsung  
(72,57%)  
(Rp 10.946.578.639.660)

Belanja Pegawai  
(15,87%)  
(Rp 2.393.404.732.510)

PPKA (Bagi Hasil Pajak Kab/Kota,  
Dana BOS, Bantuan Keuangan Kab/Kota,  
Beasiswa Anak Yatim) (11,56%)  
(Rp 1.744.020.573.957)



**Rp. 1,816 T**

BPSDM, DAYAH, ARPUS, DISHUB,  
TANBUN, NAKER, RSUZA, BPBJ,  
MPA, B.ISRA, DISDIK

- Beasiswa Bagi Anak Yatim, Miskin & Umum
- Penguatan Dayah

- Pengembangan Pustaka

- Pembangunan Gedung Sekolah & Sarana-Prasarana Pendidikan



**Rp. 127,728 M**

PANGAN, DPMG, DINSOS, TANBUN,  
DISNAK, B.EKON

- Mengurangi Kawasan Rawan Pangan
- Pengembangan Kawasan Lumbung Pangan
- Mewujudkan Ketersediaan Pangan



**Rp. 57,808 M**

DPMG, BPKA, KKW, SETWAN, BPBJ,  
B.TAPEM, DP3A, B.UMUM, B.HUKUM,  
MEDAN, B.EKON, SATPOL, DISHUB,  
DINSOS, B.ORGAN, INSPEK,  
B.ADPEM, B.ISRA

- Peningkatan Pelayanan Publik
- Peningkatan Pelayanan Transportasi Umum
- Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin, Perempuan dan Anak



**Rp. 134,980 M**

PORA, BIRO ISRA

- Penyelenggaraan Aceh Marathon Internasional
- Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga
- Kongres Pemuda



**Rp. 359,374 M**

PERKIM, DINSOS

- Pembangunan Rumah Dhuafa (4.142 Unit)
- Renovasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Keluarga Miskin (73 Unit)



**Rp. 64,268 M**

ESDM

Penyediaan Sumber Listrik dan Pembangunan PLTMH



**Rp. 10,998 M**

B. TAPEM, KESBANG, BRA, TANAH,  
MAA, SATPOL-PP

- Optimalisasi Implementasi Turunan UUPA
- Penyelarasan MoU Helsinki dengan Turunan UUPA



**Rp. 73,322 M**

BPBA, DLHK, DINSOS

- Kegiatan Terkait Adaptasi Perubahan Iklim
- Penguatan Sistem Mitigasi dan Manajemen Resiko Bencana



**Rp. 47,684 M**

KOMINFO, DRKA, BKA, DPMG, TANAH,  
NAKER, B. HUMAS, ARPUS, BAPPEDA,  
B. ADPEM

- Penerapan e-Government
- Pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi
- Penyediaan Data Informasi



**Rp. 361,251 M**

KELAUTAN, DISNAK, TANBUN

- Pengembangan pelabuhan Perikanan, Sarana dan Prasarana Pelabuhan, dan Dermaga
- Modernisasi Teknologi Pertanian dan Perkebunan



**Rp. 43,055 M**

INDAG, DPMG, B.EKON,  
DINSOS & BUDPAR

- Peningkatan Keterampilan Kerja
- Pengembangan UMKM
- Pengembangan Sentra Ekonomi & Industri Kreatif



**Rp. 166,818 M**

INDAG, KOP UKM, BUDPAR, DPMG,  
B.EKON, DPMP

- Persiapan Pembangunan Kawasan Industri
- Pengembangan Kepariwisata
- Penerapan e-Perizinan



**Rp. 151,095 M**

P.ACEH, MPU, B.MAL, MAA, DINSOS,  
BUDPAR, SI, DPMG, MPU, DP3A,  
KKW, ISRA

- Pembangunan dan Pelestarian Situs Sejarah
- Penguatan Kelembagaan/Institusi ke-Islaman, Sosial & Budaya
- Promosi Seni & Budaya Aceh
- Pekan Kebudayaan Aceh ke-7



**Rp. 3,741 T**

PERKIM, TANAH, DISHUB, PENGAIAN,  
BPBJ, NAKER, PU

- Pembangunan Jalan (504.210 Meter)
- Pembangunan Jembatan (5.209,6 Meter)
- Pembangunan Irigasi (499.959 M2),
- Embung (19 Unit)
- Pembangunan Gedung (538 Paket)
- Pembangunan Bandara (4 Unit)
- Pembangunan Pelabuhan (10 Unit)

Instalasi Air Minum (35 Paket)

Pengendalian Banjir (66 Paket)

Penyediaan Fasilitas Pendukung Infrastruktur (561 Paket)



**drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc**  
Gubernur Aceh

**Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**  
Wakil Gubernur Aceh

\* Tidak Semua Kegiatan Tercantum Dalam Infografis ini, Kegiatan Detail Ada Pada Masing-masing SKPA

**Humas**  
& Protokol  
www.humas.acehprov.go.id

www.humas.acehprov.go.id

@humasaceh humasaceh humas setda aceh

**"MARI KAWAL BERSAMA...!!"**  
(GUBERNUR ACEH, drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc)